



UNIVERSITAS INDONESIA

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
INVESTASI DI KABUPATEN BOGOR DAN KAITANNYA DENGAN
KETAHANAN DAERAH**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
(MSi) pada Program Pengkajian Ketahanan Nasional**

FAUZI
NPM : 0606023002

**Kekhususan Kajian Strategik Ketahanan Nasional
Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional
Pasca Sarjana
Universitas Indonesia
Jakarta, 2009**



**PROGRAM PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDONESIA**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : F A U Z I
NPM : 0606023002
Program Studi : PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
Judul Tesis : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
INVESTASI DI KABUPATEN BOGOR DAN
KAITANNYA DENGAN KETAHANAN DAERAH

Pembimbing Tesis

PEMBIMBING I

(Prof. DR. Lepi T Tarmidi)

PEMBIMBING II

(Sutoyo, SH, MSi)

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Fauzi
NPM : 0606023002
Program Studi : Ketahanan Nasional
Judul Tesis : **Faktor- faktor yang Mempengaruhi Investasi
di Kabupaten Bogor dan Kaitannya dengan
Ketahanan Daerah**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (MSi) pada Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada :

Hari/Tanggal : Rabu/17 Juni 2009

Tempat : Ruang Kuliah PKN UI Gedung C Lt IV
Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat

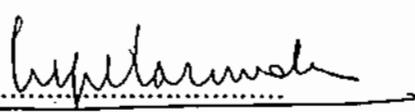
Waktu : 13.30 s.d. 15.30 WIB

Dan dinyatakan : **L U L U S**

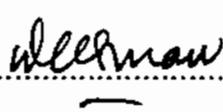
DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. DR. Tb Ronny R Nitibaskara.....

Anggota : 1. DR. Amirsyah Sahil, SE, MSi.....

2. Prof. DR. Lepi T Tarmidi.....

3. Sutoyo, SH, MSi.....

4. Prof. DR. Wan Usman, MA.....

Nama : Fauzi
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional
Pasca Sarjana Universitas Indonesia
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi di
Kabupaten Bogor dan Kaitannya Dengan Ketahanan
Daerah

ABSTRAK

Investasi merupakan salah satu faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga ketahanan ekonomi meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan ketahanan daerah.

Investasi dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi. Faktor ekonomi diantaranya Produk Domestik Bruto (PDB), suku bunga, nilai tukar, infrastruktur, sedangkan faktor non ekonomi diantaranya kondisi sosial masyarakat, politik, penegakan hukum dan keamanan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di kabupaten Bogor dan kaitannya dengan ketahanan daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif. Faktor yang berhubungan dengan minat investasi yang dianalisis adalah pelayanan pemerintah, fasilitas penunjang, kualitas informasi, lokasi, kondisi sosial masyarakat, beban pungutan non ekonomi. Faktor tersebut dianalisis dari jawaban investor yang diperoleh melalui kuisioner. Minat investasi dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu tinggi dan rendah. Tinggi, jika paling lambat 3 tahun sejak aplikasi investasinya disetujui pemerintah, sudah mendirikan kantor, investor sudah melakukan kegiatan fisik seperti pembangunan pabrik dan merekrut tenaga kerja. Untuk menganalisis faktor yang berhubungan bermakna secara statistik dengan minat investasi digunakan metoda statistik regresi logistik.

Sejumlah 30 responden (PMA 15 industri, PMDN 8 industri, dan non PMDN 7 industri) telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa investasi di kabupaten Bogor mengalami fluktuasi, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami kenaikan. Tidak ada hubungan yang bermakna antara faktor lokasi, sikap sosial masyarakat, beban pungutan dengan minat investasi. Dengan analisis multivariat diperoleh faktor pelayanan pemerintah merupakan faktor yang paling dominan berhubungan bermakna dengan minat investasi.

Dari penelitian ini disimpulkan faktor yang mempengaruhi minat investasi yaitu adalah fasilitas penunjang, pelayanan pemerintah dan kualitas informasi, namun faktor yang paling dominan adalah pelayanan pemerintah. Selanjutnya investasi yang ditanam di kabupaten Bogor baik langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga ketahanan ekonomi kabupaten Bogor yang merupakan bagian dari ketahanan daerah kabupaten Bogor akan meningkat juga.

Name : Fauzi

Study Programme : Studies for National Resilience
Post Graduate Programme University of Indonesia

Title : Associated Factors of Investment in Bogor Region and
the Impact on Region Resilience

ABSTRACT

Investment is one of important factors for economic growth. Economic growth in a country or region is essential to improve the prosperity of society, therefore, economic tenacity will improve and region resilience will be risen.

Investment interest will depend on factors related economic and non economic, among others Gross Domestic Product, rate, curs, inflation, infrastructure as economic factor while non economic factors are social community condition, politic, security condition. The objective of this study was to analyze the factors affecting the investment interest .

This study using combination of quantitative and qualitative study. Analyzed associated risk factors were government services, infrastructure, information quality, location, social community condition, pickings which is obtained from investor perspective using a questionnaire. The high investment interest is defined if not more than 3 years since Government approved the investment application, investor has had the office, has conduct the activities such as provide production facility and worker/personnel recruitment. Logistics regression analysis was applied to analyze the risk factors of the investment interest.

A total of 30 respondences (FDI 15 industries, Domestic investment 8 industries and non Domestic investment 7 industries) participated in this study. Data from Statistic Bureau of Bogor Region have shown that investment in Bogor Region has fluctuated while trend of economic growth rate is rise. No significant association was found between investment interest and location, social community condition, pickings. However, using logistic regression as the multivariate analysis has found the government services was significant associated factor for investment interest.

To-sum up, infrastructure, government services and information quality were the associated risk factors, however government services is the main associated factors of investment interest. Further, the investment in Bogor region will improve directly or indirectly the prosperity of society, so that the economic resilience in Bogor region is as part of region resilience will rise.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya oleh rahmat, karunia dan ridho-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi di kabupaten Bogor dan Kaitannya dengan Ketahanan Daerah"*. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mendapat gelar Magister Sains (MSi) pada Program Pasca Sarjana Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia

Selesaiannya penyusunan tesis ini tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan dukungan banyak pihak baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu :

1. Bapak Prof. DR. Lepi T Tarmidi, selaku dosen pembimbing yang selalu berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini.
2. Bapak Sutoyo, SH, MSi, selaku dosen pembimbing yang selalu berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini.
3. Dra. Sri Pujiati, MEpid, isteri tercinta yang banyak membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Kolonel Laut (KH) Ir. Sutanto, selaku atasan penulis di Direktorat Analisa Lingkungan Strategis Ditjen Strahan Dephan, yang banyak memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
5. Ketua jurusan, para dosen pengajar dan seluruh staf PKN yang telah banyak membantu penulis.

6. Pimpinan BPS kabupaten Bogor, Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi BKPM dan para pimpinan perusahaan di kabupaten Bogor, yang telah membantu penulis dalam memberikan data yang diperlukan.
7. Rekan-rekan mahasiswa PKN angkatan XXV yang telah memberikan dorongan semangat sehingga tesis ini dapat selesai tepat waktu.
8. Pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan penulis dan keterbatasan waktu penelitian, oleh karena itu penulis akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif.

Hanya kepada Allah yang maha pengasih dan maha penyayang saya memohon, kiranya Allah membalas segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan oleh Bapak/Ibu kepada saya.

Akhir kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekhilafan selama saya menempuh pendidikan di PKN UI dan penyusunan tesis ini.

Jakarta, Juni 2009

FAUZI
NPM 0606023002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Ruang Lingkup	6
1.5 Metodologi Penelitian.....	7
1.5.1. Disain Penelitian.....	7
1.5.2. Sumber Data.....	7
1.5.3. Pengumpulan Data.....	7
1.5.4. Analisis Data.....	10
1.5.5. Analisis Univariat.....	12
1.5.6. Analisis Bivariat.....	13
1.5.7. Analisis Multivariat.....	13
BAB II TEORI INVESTASI DAN KETAHANAN NASIONAL	
2.1. Pengertian Investasi	18
2.1.1. Penanaman Modal Asing (PMA).....	20

2.1.2.	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ..	22
2.2.	Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi.....	22
2.3.	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Investasi.....	24
2.3.1.	Penelitian Sebelumnya	24
2.3.2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)....	26
2.3.3.	Suku Bunga	27
2.3.4.	Nilai Tukar	30
2.3.6.	Inflasi	30
2.3.6.	Infrastruktur/Fasilitas Penunjang	32
2.3.7.	Kebijakan Pemerintah.....	34
2.4.	Ketahanan Nasional dan Ketahanan Daerah	38
2.4.1	Pengertian Ketahanan Nasional.....	38
2.4.2.	Ketahanan Daerah.....	43
2.5.	Ketahanan Ekonomi seagai Unsur Ketahanan Daerah.....	44
BAB III	PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI KABUPATEN BOGOR	
3.1.	Sejarah Singkat.....	46
3.2.	Letak dan Luas Wilayah	48
3.3.	Perekonomian Kabupaten Bogor.....	52
3.3.1.	PDRB Kabupaten Bogor.....	55
3.3.2.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor	58
3.4.	Fasilitas Penunjang Investasi.....	62
BAB IV	FAKTOR-FAKTOR PENENTU PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BOGOR	
4.1.	Minat Investasi.....	63
4.2.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi.....	63

4.3.	Hubungan Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Investasi.....	65
4.3.1.	Hasil Kuisisioner.....	65
4.3.2.	Analisis Bivariat.....	67
4.3.2.1.	Faktor fasilitas penunjang. terhadap minat investasi.....	67
4.3.2.2.	Faktor pelayanan pemerintah terhadap minat Investasi.....	68
4.3.2.3.	Faktor informasi terhadap minat Investasi.....	69
4.3.2.4.	Faktor lokasi terhadap minat Investasi.....	70
4.3.2.5.	Faktor sikap sosial masyarakat terhadap minat Investasi.....	71
4.3.2.6.	Faktor beban pungutan non ekonomi terhadap minat Investasi.....	73
4.3.3.	Analisis Multivariat.....	73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.	Kesimpulan	76
5.2.	Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor 1999-2007	48
Tabel 3.2. Nilai Investasi PMDN Kabupaten Bogor Tahun 1998-2008	52
Tabel 3.3. Nilai Investasi PMA Kabupaten Bogor Tahun 1998-2008	53
Tabel 3.4. Nilai PDRB Riil Kabupaten Bogor Tahun 1998-2007.....	55
Tabel 3.5. PDRB Kabupaten Bogor Menurut Lapangan Usaha Tahun 2001-2007.....	56
Tabel 3.6. Perbandingan PAD dengan PDRB Tahun 1998-2007.....	57
Tabel 3.7. Laju Pertumbuhan PDRB Riil Kabupaten Bogor Tahun 1998-2007	60
Tabel 4.1. Distribusi frekuensi dan proporsi variabel bebas yang diteliti	64
Tabel 4.2. Hubungan keenam variabel bebas terhadap Investasi.....	66
Tabel 4.3. Faktor fasilitas penunjang terhadap minat Investasi.....	67
Tabel 4.4. Faktor pelayanan pemerintah terhadap minat Invetasi.....	69
Tabel 4.5. Faktor kualitas informasi terhadap minat Invetasi.....	70
Tabel 4.6. Faktor lokasi terhadap minat Invetasi.....	71
Tabel 4.7. Faktor sikap sosial masyarakat terhadap minat Invetasi.....	72
Tabel 4.8. Faktor beban pungutan non ekonomi terhadap minat Invetasi.....	73
Tabel 4.9. Analisis multivariat dari ketiga variabel bebas.....	74
Tabel 4.10. Analisis multivariat dari ketiga variabel bebas.....	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Kerangka Teori.....	9
Gambar 1.2. Kerangka Pikir.....	10
Gambar 2.1. Teori Klasik tentang Suku Bunga.....	28
Gambar 3.1. Grafik Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	59
Gambar 3.2. Grafik Distribusi persentase PDRB Kab Bogor atas dasar harga konstan tahun 2007.....	61
Gambar 4.1. Proporsi minat investasi responden.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara di dunia dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan menempati posisi keempat setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar jika dibarengi dengan peningkatan pendapatan perkapita akan merupakan suatu pasar potensial bagi produk industri dan hal ini sekaligus merupakan daya tarik investor untuk berinvestasi di Indonesia baik investasi yang datang dari luar negeri (asing) maupun investasi dalam negeri. Namun pada kenyataannya peningkatan atau pertumbuhan jumlah penduduk tidak seiring dengan peningkatan pendapatan sehingga membawa masalah baru dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk terutama berpengaruh sangat besar baik dalam hal pendapatan perkapita, standar kehidupan, pembangunan pertanian, lapangan kerja maupun dalam hal pembentukan modal (Bachrawi Sanusi, 2004;79)

Adanya investasi sangat menguntungkan bagi Indonesia untuk meningkatkan pendapatan riil seperti peningkatan upah dan peningkatan penerimaan pemerintah, selain itu investasi juga bermanfaat secara tidak langsung seperti diperkenalkannya teknologi baru dan pengetahuan baru. Dilain pihak investasi diharapkan peranannya dalam memperbesar devisa Indonesia melalui ekspor produksinya ke luar negeri dan kenyataannya banyak perusahaan khususnya investasi asing yang sudah mengekspor hasil produksinya (Aminuddin Ilmar, 2004: 186).

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada konteks pembangunan nasional, investasi memegang peranan yang penting. Sejarah Orde Baru selama periode 1966-1997 telah membuktikan betapa pentingnya peran investasi langsung atau penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebagai salah satu motor penggerak pembangunan dan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi.

Secara umum investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut terhadap investasi, dan adanya iklim investasi yang kondusif. Daya tarik tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kemampuan daerah merumuskan kebijakan terkait dengan investasi dan dunia usaha, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, makro ekonomi yang kondusif, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam arti luas serta stabilitas politik (Sarwedi, 2002:10). Dengan demikian investasi dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, yang dapat dikategorikan menjadi faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi minat investasi yaitu antara lain dapat berupa PDRB, tingkat suku bunga bank, nilai tukar, inflasi, tenaga kerja, infrastruktur, informasi tentang investasi, lokasi, beban pungutan dan kebijakan pemerintah. Sedangkan faktor non ekonomi antara lain sikap sosial masyarakat, situasi politik dan keamanan, penegakan hukum, masalah pertanahan, pelayanan birokrasi pemerintah (Kajian Ekonomi Regional Sulawesi Selatan, 2007:34)

Peningkatan investasi daerah akan dapat terwujud jika di daerah terdapat potensi yang dapat “dijual” kepada para investor, baik itu berupa potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Selanjutnya hal yang sangat

penting lagi adalah kemampuan daerah menjual potensi yang dimilikinya tersebut. Kemampuan daerah untuk menjual potensi sumber daya yang dimilikinya harus didukung oleh terciptanya iklim yang kondusif dan mendukung investasi di daerah seperti adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi di daerah. Pemerintah Daerah hendaknya juga mampu melahirkan regulasi yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian yang mampu merebut investor PMA dan PMDN yang sekaligus memberdayakan investor lokal. Keberhasilan Pemerintah Daerah mengelola faktor-faktor tersebut akan dapat mendorong peningkatan daya saing daerah dalam merebut investor.

Dalam rangka menghadapi era globalisasi dan pasar bebas, persaingan antar daerah dalam menjual potensinya dan merebut investor akan semakin terbuka tidak hanya terhadap investor nasional tetapi juga internasional. Kesiapan daerah terutama SDM pengelola dan infrastruktur yang tersedia akan sangat mendukung dalam merebut para investor untuk bersedia menanamkan investasinya di daerah.

Persaingan antar daerah dalam merebut investor harus dikembangkan dalam suasana persaingan dan kompetisi yang positif dan sehat. Walau bagaimanapun sudah tentu suatu daerah tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan daerah lainnya. Oleh sebab itu diharapkan setiap daerah dapat bekerjasama dan saling mendukung dalam merebut investor dengan menonjolkan potensi atau produk unggulan masing-masing daerah. Sebagai contoh suatu daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia tentu saja membutuhkan infrastruktur seperti pelabuhan, bandar udara atau jalan raya untuk mengirim produknya ke luar daerah. Hal ini akan

sangat berhubungan dengan daerah lain yang memiliki fasilitas tersebut. Tanpa adanya kerjasama antar daerah maka bukan tidak mungkin terjadi pengenaan retribusi atau pungutan yang berlebihan atau pemboikotan dari daerah yang dilalui. Tentu saja kondisi ini akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor terhadap daerah.

Peningkatan jumlah investasi merupakan salah satu langkah yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah kabupaten Bogor, dengan demikian secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Kesejahteraan yang tercipta akan menopang ketahanan daerah kabupaten Bogor, yang merupakan bagian integral dari ketahanan wilayah Jawa Barat. Sementara itu ketahanan nasional secara umum akan terwujud apabila ketahanan daerah dapat diwujudkan, artinya dengan meningkatnya investasi di daerah secara tidak langsung akan mempengaruhi terciptanya ketahanan daerah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik di kabupaten Bogor dengan masuknya investasi maka terjadi kenaikan PDRB sejak 1998 sampai dengan 2007 yaitu dari Rp. 5.376,8 milyar hingga mencapai Rp. 28.150,7 milyar.

Dari latar belakang yang dijabarkan di atas, peneliti terdorong untuk meneliti bagaimana investasi dapat ditingkatkan di daerah, khususnya di kabupaten Bogor sehingga potensi sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas terlihat bahwa investasi merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bogor. Untuk itu akan diteliti bagaimana hubungan faktor ekonomi dan non ekonomi dengan investasi. Dari rumusan masalah ini peneliti menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan antara fasilitas penunjang, kebijakan pemerintah, sikap sosial masyarakat, informasi tentang investasi, lokasi dan beban pungutan non ekonomi dengan investasi di kabupaten Bogor?
2. Faktor apa yang paling dominan mempengaruhi investasi di kabupaten Bogor?
3. Bagaimana dampak investasi terhadap ketahanan daerah kabupaten Bogor ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk :

1. Menganalisis hubungan fasilitas penunjang, kebijakan pemerintah, sikap sosial masyarakat, informasi tentang investasi, lokasi dan beban pungutan non ekonomi dengan investasi di kabupaten Bogor
2. Menganalisis faktor yang paling dominan mempengaruhi investasi di kabupaten Bogor

3. Menganalisis dampak investasi terhadap ketahanan daerah kabupaten Bogor

1.4. Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan studi deskriptif analitis untuk mengetahui informasi tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat investasi sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2008. Faktor determinan yang akan diteliti yaitu fasilitas penunjang, kebijakan pemerintah, sikap sosial masyarakat, informasi tentang investasi, lokasi dan beban pungutan non ekonomi.

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Bogor dan sebagai obyek dalam penelitian adalah industri. Pertimbangan dipilihnya kabupaten Bogor sebagai tempat penelitian karena kabupaten Bogor merupakan kota satelit yang tidak terlalu jauh dari ibu kota Jakarta. Selain kabupaten-kabupaten lain di Jawa Barat, kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten yang cukup besar investasinya terutama di sektor industri.

Data perekonomian kabupaten Bogor yang diperlukan untuk memberi gambaran apakah terjadi peningkatan PDRB dan pertumbuhan ekonomi diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. Untuk memberi gambaran jumlah dan nilai investasi di kabupaten Bogor diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Data faktor-faktor yang mempengaruhi investasi diperoleh dari jawaban para responden dengan menggunakan kuisisioner yang kemudian dilakukan analisis statistik.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Disain penelitian

Penelitian di kabupaten Bogor tentang hubungan faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi terhadap minat investasi ini merupakan gabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan metode analitik. Penelitian dilaksanakan dengan cara membagikan kuisisioner yang berisi pertanyaan dengan skala ukur nominal.

1.5.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi (minat investasi, infrastruktur, kebijakan pemerintah, sikap sosial masyarakat, informasi tentang investasi, lokasi dan beban pungutan non ekonomi) adalah data dari jawaban responden atas pertanyaan dalam kuisisioner yang disebarakan kepada 30 industri di kabupaten Bogor.

Jumlah 30 responden merupakan ukuran jumlah minimal yang layak dalam suatu penelitian. Sesuai menurut Roscoe dalam Sugiyono (2003; 103) ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 s.d. 500 responden.

1.5.3. Pengumpulan data

Metode untuk memperoleh data yang akan digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah dengan cara pemberian kuisisioner kepada sampel responden. Variabel bebas yang akan diteliti dalam penelitian ini dituangkan ke dalam bentuk pertanyaan pada kuisisioner. Dalam hal ini faktor-faktornya terdiri

dari fasilitas penunjang (infrastruktur), kebijakan pemerintah, sikap sosial masyarakat, informasi tentang investasi, lokasi dan beban pungutan non ekonomi.

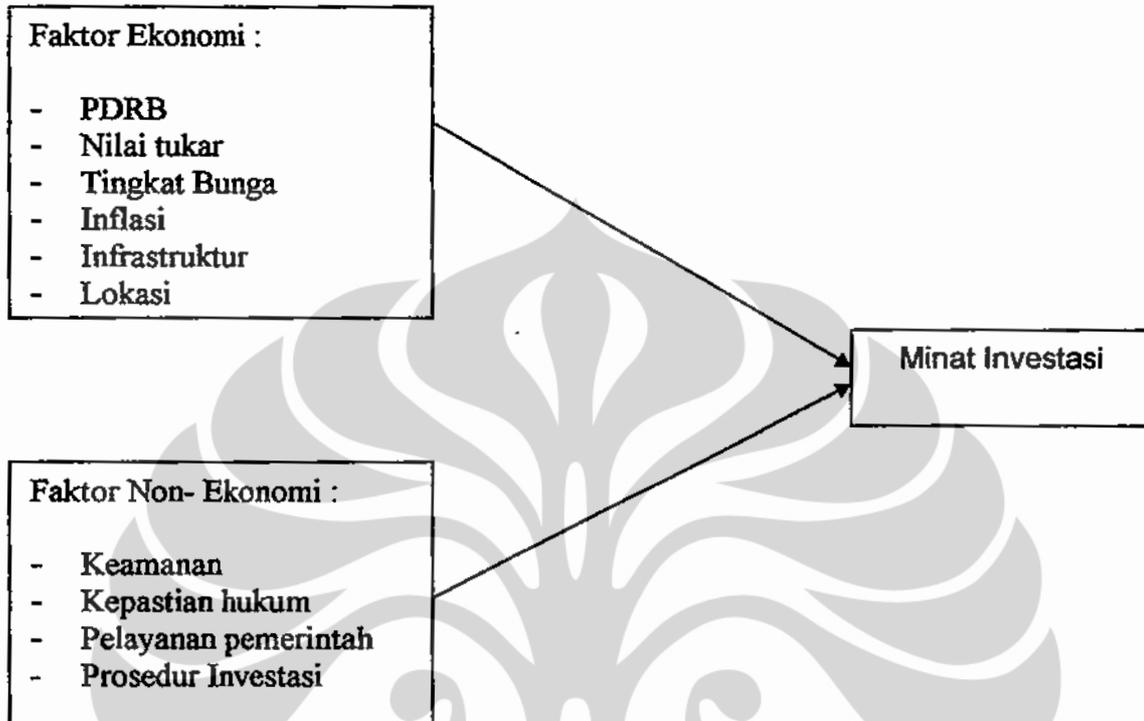
Populasi obyek penelitian ini adalah seluruh PMA dan PMDN yang terletak di kabupaten Bogor dan kegiatannya telah direalisasikan minimal satu tahun pada saat penelitian. Untuk pemilihan sampel dipilih jumlah minimal yang dianjurkan oleh Roscoe. Menurut Roscoe dalam Sugiyono (2003;103) ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500 responden.

Pengelompokan jawaban responden berdasarkan skala Guttman yaitu skala yang digunakan untuk jawaban yang bersifat jelas dan hanya ada 2 jenis pilihan dan dari data yang diperoleh akan dianalisis secara statistik (regresi) untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan yaitu mengetahui hubungan antara variabel bebas yang diteliti dengan variabel terikat dan variabel bebas yang dominan. Penelitian ini tidak menggunakan skala Likert karena skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang dan tidak dianalisis secara statistik, sehingga tidak digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas yang diteliti dengan variabel terikat dan variabel bebas yang dominan. Dalam skala Guttman, variabel yang akan diukur tidak dijabarkan menjadi indikator seperti halnya skala Likert (Riduwan, 2005:12-17).

1.5.4. Kerangka pikir

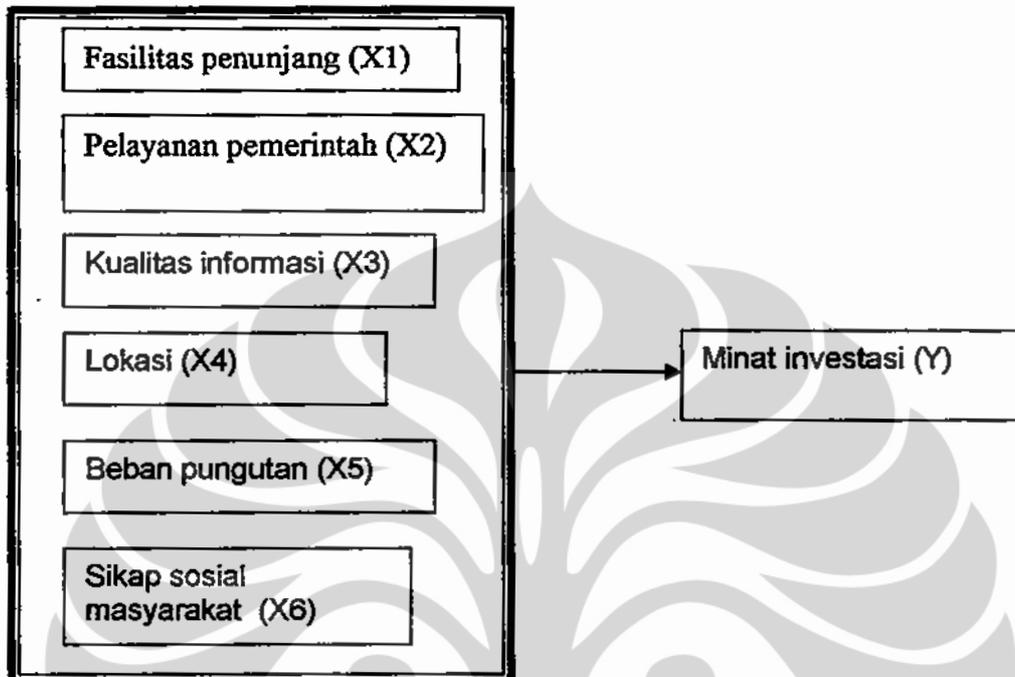
Dari penelitian terdahulu tentang berbagai faktor yang berhubungan dengan terjadinya investasi, maka kerangka teori disusun seperti pada gambar di halaman 9.

Gambar 1.1. kerangka teori



Berpedoman dari kerangka teori tersebut maka disusun suatu kerangka pikir penelitian dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan ketersediaan data maka tidak semua faktor pada kerangka teori diteliti. Faktor-faktor yang dapat diteliti sehubungan dengan tujuan penelitian, disajikan pada gambar di halaman 10.

Gambar 1.2. Kerangka pikir



Selanjutnya di bawah ini merupakan definisi operasional dari variabel terikat dan variabel bebas serta pilihan jawaban dengan skala Guttman.

1. Minat berinvestasi

Tinggi, jika paling lambat 3 tahun sejak aplikasi investasinya disetujui pemerintah, sudah mendirikan kantor, investor sudah melakukan kegiatan fisik seperti pembangunan pabrik dan merekrut tenaga kerja.

Rendah, jika lebih dari 3 tahun sejak aplikasi investasinya disetujui pemerintah, investor belum memulai kegiatan apapun.

2. Fasilitas penunjang (sarana/prasarana transportasi, komunikasi dan energi).

Baik, jika sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan produksi, berupa sarana/prasarana transportasi (darat, laut, udara), komunikasi

(telepon dan perangkat informatika lainnya), serta energi (listrik) tersedia dengan cukup.

Kurang, jika sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan produksi, berupa sarana/prasarana transportasi (darat, laut, udara), komunikasi (telepon dan perangkat informatika lainnya), serta energi (listrik) tidak tersedia dengan cukup.

3. Pelayanan pemerintah daerah (prosedur perizinan)

Baik dalam arti ada kemudahan-kemudahan dalam proses perencanaan sampai kegiatan berproduksi khususnya menyangkut administrasi perizinan.

Kurang dalam arti proses perencanaan sampai kegiatan berproduksi khususnya menyangkut administrasi perizinan cukup sulit dan berbelit-belit.

4. Kualitas Informasi (informasi aktual yang akurat mengenai potensi dan peluang investasi)

Lengkap dalam arti ada gambaran yang jelas mengenai peluang investasi melalui informasi aktual yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan data dimutakhirkan paling tidak satu kali dalam satu tahun.

Tidak lengkap dalam arti tidak ada gambaran yang jelas mengenai peluang investasi melalui informasi aktual yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan data tidak dimutakhirkan sehingga data yang ada tidak aktual lagi.

5. Sikap sosial masyarakat (tindakan masyarakat yang bersifat kriminal, destruktif)

Kondusif, artinya masyarakat sekitar lokasi investasi tidak terganggu oleh kehadiran penanaman modal/perusahaan tersebut. Masyarakat bahkan ikut

terlibat kegiatan produksi (menjadi karyawan), tidak melakukan tindakan kriminal yang mengganggu kegiatan produksi atau perusakan dan pencurian pada perusahaan

Tidak kondusif, artinya masyarakat sekitar lokasi investasi merasa terganggu oleh kehadiran perusahaan tersebut, sehingga melakukan tindakan yang mengganggu kegiatan produksi atau perusakan dan pencurian pada perusahaan

Tidak jelas (apatis) karena masyarakat bersikap tidak peduli terhadap kehadiran penanaman modal/perusahaan tersebut.

6. Lokasi investasi (akses untuk mendapatkan bahan baku dan memasarkan hasil produksi)

Strategis jika lokasi investasi memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan bahan baku dan memasarkan hasil produksinya.

Tidak strategis jika lokasi investasi tidak memiliki akses yang baik untuk mendapatkan bahan baku dan memasarkan hasil produksinya.

7. Beban pungutan non-ekonomis (biaya dalam bentuk sumbangan kepada masyarakat, aparat yang dibebankan kepada investor)

Berat karena sumbangan tersebut sebenarnya tidak terkait langsung dengan kegiatan produksi sehingga investor terpaksa kehilangan sebagian besar keuntungannya untuk biaya-biaya tersebut.

Ringan karena sumbangan yang diminta cukup kecil dibanding keuntungan yang didapat.

1.5.5. Analisis Data

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat investasi sehingga merupakan data kualitatif. Variabel terikat dikategorikan menjadi dua/dikotomi yaitu tinggi dan rendah. Data variabel bebas (fasilitas penunjang, kebijakan pemerintah, sikap sosial masyarakat, informasi tentang investasi, lokasi dan beban pungutan non ekonomi) yang diperoleh juga berupa data kualitatif yang dikategorikan menjadi dua.

Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat dilakukan analisis bivariat. Dalam penelitian ini, analisis bivariat yang kedua variabelnya berupa data katagorik digunakan uji statistik untuk uji dua proporsi yaitu dengan menggunakan uji *Chi square*. Data dianalisis dengan menggunakan software SPSS 13.0, sedangkan uji statistik untuk analisis multivariat dalam penelitian ini menggunakan *logistic regression*.

Untuk memudahkan analisis statistik menggunakan SPSS maka dilakukan coding untuk masing-masing katagori variabel bebas dan variabel terikat. Katagori minat investasi tinggi akan diberi kode 1 dan minat investasi rendah diberi kode 0, sedangkan variabel bebas yang terdiri dari 6 faktor akan dicoding terlebih dahulu seperti di bawah ini:

Katagori Fasilitas penunjang (X1)	Coding
Baik	1
Kurang	0

Katagori Pelayanan pemerintah (X2)	Coding
Baik	1
Kurang	0

Katagori Kualitas informasi (X3)	Coding
Lengkap	1
Tidak lengkap	0

Katagori Sikap sosial masyarakat (X4)	Coding
Kondusif	1
Tidak Kondusif	0
Apatis	2

Katagori lokasi (X5)	Coding
strategis	1
Tidak strategis	0

Katagori beban pungutan (X6)	Coding
berat	0
ringan	1

1.5.6. Analisis Univariat

Untuk memberikan gambaran distribusi frekuensi dan proporsi variabel terikat dan masing-masing variabel bebas, maka data yang telah dicoding dilakukan analisis univariat menggunakan program SPSS. Penyajian data akan ditampilkan dalam bentuk tabular dan tekstular.

1.5.7. Analisis Bivariat

Seperti yang telah dijelaskan pada analisis data, untuk mengetahui hubungan masing-masing faktor dari keenam faktor yang diteliti dalam penelitian ini digunakan uji statistik *Chi square*. Tingkat kepercayaan dipilih 95% atau $\alpha < 0,05$ (kesalahan tipe I). Kedua variabel yang dianalisis dikatakan berhubungan jika nilai P yang diperoleh kurang dari nilai $\alpha < 0,05$, sedangkan nilai P yang diperoleh lebih dari $\alpha > 0,05$ maka kedua variabel yang dianalisis dikatakan tidak berhubungan. Langkah yang dilakukan yaitu data dari masing-masing variabel bebas dan variabel terikat yang telah dicoding dianalisis menggunakan uji *Chi square* dengan program SPSS.

Selain itu dari analisis bivariat juga dapat diketahui variabel bebas untuk kandidat model yang akan masuk dalam analisis multivariat dengan melihat nilai P. Bila nilai $P < 0,25$ maka variabel tersebut dipilih sebagai kandidat model dalam analisis multivariat.

1.5.8. Analisis Multivariat

Oleh karena data variabel bebas dan variabel terikatnya berupa data katagorik, maka pendekatan matematik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat yang bersifat dikotomi dengan menggunakan regresi logistik.

Analisis Multivariat dapat dilakukan untuk mengetahui faktor risiko yang dominan dari beberapa faktor risiko yang diuji yaitu analisis multivariat model prediksi. Langkah yang dilakukan yaitu :

- Pertama, menganalisis satu persatu variabel bebas dan variabel terikat menggunakan uji *logistic regression* dalam program *SPSS*. Jika hasil analisis diperoleh nilai $P < 0,25$, maka variabel bebas tersebut dimasukkan dalam pemodelan
- Kedua, semua variabel bebas yang mempunyai nilai $P < 0,05$ dianalisis secara bersama-sama menggunakan uji regresi logistik dalam program *SPSS*. Dilihat variabel bebas mana yang berpengaruh secara statistik yaitu jika nilai $P < 0,05$. Untuk variabel bebas yang memiliki nilai $P < 0,05$, tetap dalam model sedangkan variabel bebas yang memiliki nilai $P > 0,05$ dikeluarkan dari model.
- Ketiga, pengeluaran variabel bebas dilakukan satu persatu dimulai dari variabel yang mempunyai nilai P terbesar. Jika setelah suatu variabel bebas dikeluarkan dapat merubah koefisien regresi sama dengan atau lebih dari 10%, maka variabel bebas tersebut tidak boleh dikeluarkan. Sebaliknya jika koefisien regresi berubah kurang dari 10% maka variabel bebas tersebut boleh dikeluarkan
- Keempat, dari hasil pengujian ini ditetapkan model akhir dari regresi logistik. Rumus model logistik yaitu (Sutanto 2006:159-165)

$$\text{Logit } P (Z=1) = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_i X_i$$

Dimana :

P = peluang

Z = minat investasi

α = konstanta

β = koefisien regresi logistik

X1 = variabel fasilitas penunjang

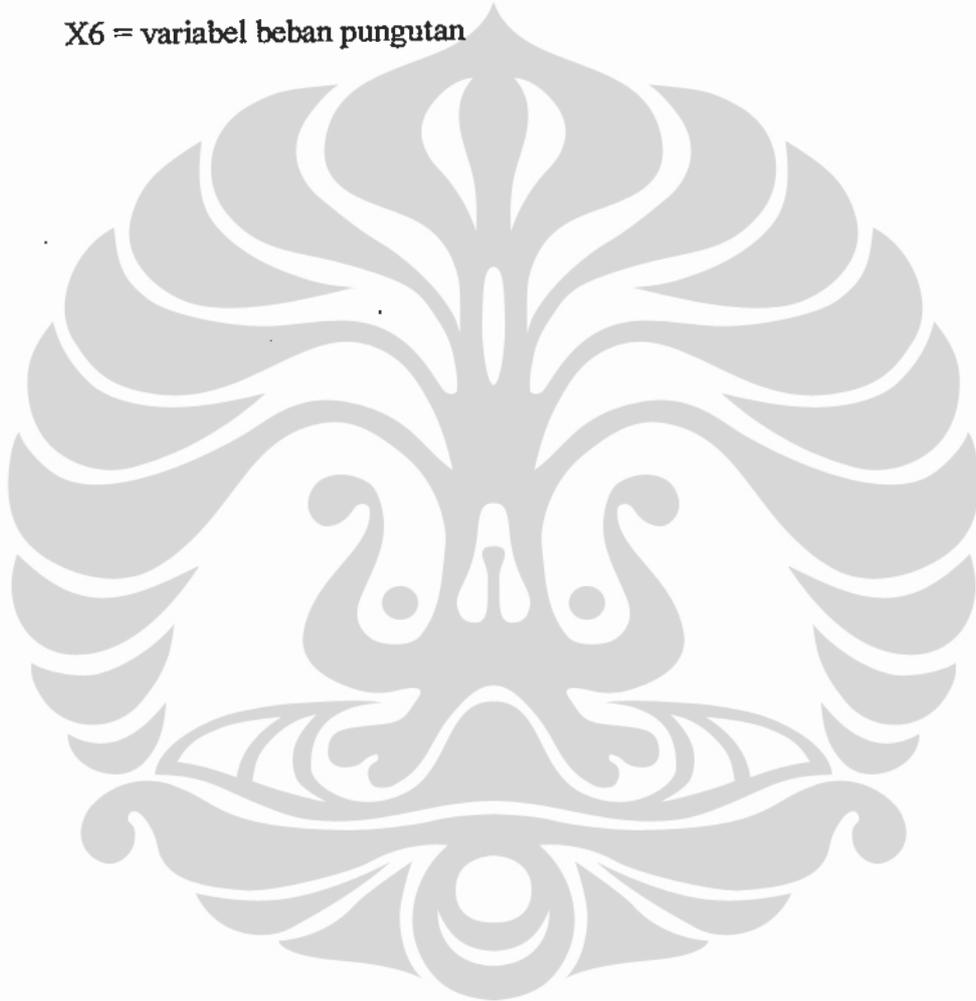
X2 = variabel Pelayanan pemerintah

X3 = variabel lokasi

X4 = variabel Kualitas informasi

X5 = variabel sikap sosial masyarakat

X6 = variabel beban pungutan



BAB II

TEORI INVESTASI DAN KETAHANAN NASIONAL

2.1. Pengertian Investasi

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan (Sadono Sukirno, 2000:336). Menurut Prathama Rahardja (2001: 75) investasi adalah sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk meningkatkan stok barang modal yaitu jumlah barang modal dalam suatu perekonomian pada saat tertentu. Sedangkan menurut BPS (2004:77) investasi dalam suatu perekonomian sangat diperlukan baik untuk menunjang pertumbuhan ekonomi maupun perluasan kesempatan kerja. Oleh karena itu upaya untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di Indonesia secara intensif sudah dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian investasi atau penanaman modal sangat penting dalam perekonomian karena secara langsung atau tidak langsung investasi dapat meningkatkan perekonomian suatu negara atau daerah.

Untuk mengatur penanaman modal Pemerintah telah membuat undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Namun demikian untuk menyempurnakannya maka pemerintah mengeluarkan undang-undang yang baru sebagai pengganti undang-undang yang

lama. Undang-undang yang baru adalah Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanaman modal atau Investasi terdiri dari dua jenis, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi portofolio adalah penanaman modal melalui bursa saham. Investasi jenis ini tidak mempunyai *multiplier effect* yang luas, karena perpindahan modal hanya terjadi di bursa saham dan tidak berimplikasi terhadap sektor riil. Selain itu, investasi jenis ini rentan terhadap perubahan. Aliran modal masuk dan keluar bisa terjadi setiap saat. Investasi langsung adalah proses investasi dimana penanaman modal dilakukan dengan membangun pabrik di negara tujuan investasi. Investasi langsung mempunyai *multiplier effect* luas, yaitu penyediaan lapangan pekerjaan dan Bergeraknya industri pendukung (Anton Agus Setyawan dan Fatchurrohman, 2004: 6)

Prospek peningkatan investasi akan segera dapat direalisasikan jika didukung oleh pemenuhan iklim investasi yang mendukung terselenggaranya proses perijinan secara cepat dan efisien, dan diikuti oleh persiapan-persiapan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di tempat penerima investasi.

Iklim investasi dapat segera ditingkatkan melalui upaya berkesinambungan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan para pelaku ekonomi di daerah dalam hal-hal berikut ini :

- Memberikan kepastian hukum atas peraturan-peraturan daerah dan produk hukum yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal sehingga tidak memberatkan beban tambahan pada biaya produksi usaha.
- Memelihara keamanan dari potensi gangguan kriminalitas oleh oknum masyarakat terhadap aset-aset berharga perusahaan, terhadap jalur distribusi barang dan gudang serta pada tempat-tempat penyimpanan barang jadi maupun setengah jadi.
- Memberikan kemudahan yang paling mendasar atas pelayanan yang ditujukan pada para investor, meliputi perijinan investasi, imigrasi, kepabeanan, perpajakan.
- Memberikan secara selektif rangkaian paket insentif investasi yang bersaing.
- Menjaga kondisi iklim ketenagakerjaan yang menunjang kegiatan usaha secara berkelanjutan. (Adityawan Chandra,2007:2).

2.1.1. Penanaman Modal Asing (PMA)

PMA adalah arus modal internasional dimana perusahaan suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Investasi asing melibatkan bukan hanya pemindahan sumber daya tetapi juga pengendalian. Perusahaan yang didirikan di tempat investasi memiliki kewajiban finansial kepada induk perusahaan karena merupakan bagian dari struktur organisasi yang sama (Krugman 1997:15). Sedangkan menurut UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh

penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan (*joint venture*) dengan penanam modal dalam negeri.

Penanaman modal asing atau investasi asing merupakan salah satu bentuk *capital inflow* ke suatu negara, dan merupakan sumber pendanaan yang terpenting bagi negara-negara berkembang. Dengan masuknya PMA ke suatu negara, ini menunjukkan kepercayaan investor asing untuk melakukan kegiatan ekonominya sehingga akan merangsang banyaknya arus modal yang masuk ke negara tersebut.

Penanaman modal asing yang dilakukan dalam jangka panjang, berarti perusahaan dari negara penanam modal melakukan pengawasan atas aktiva yang diinvestasikan di negara pengimpor modal. Penanaman modal langsung ini dilakukan dengan motivasi :

- Mendirikan cabang perusahaan di negara pengimpor modal;
- Pendirian perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara penanam modal;
- Pendirian perusahaan di negara pengimpor modal yang semata-mata dibiayai oleh negara asal penanam modal;
- Pendirian perusahaan di negara asal penanam modal untuk secara khusus beroperasi di negara lain; atau
- Menyimpan aktiva tetap di negara lain oleh perusahaan nasional dari negara asal penanam modal. (Bank Dunia,2006: 5).

Selanjutnya PMA dapat melakukan usahanya secara langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan/atau badan hukum asing dan juga dapat dilakukan melalui kerjasama (*joint Venture*) antara modal asing

dengan modal yang dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Modal yang dimiliki warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dalam perusahaan asing (PMA) yang didirikan sekurang-kurangnya 5% dari seluruh modal disetor perusahaan pada waktu pendirian perusahaan (Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994)

2.1.2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Perbedaannya dengan PMA terletak pada pelaku penanam modalnya dan jenis modalnya, kalau PMA penanam modalnya pihak asing dan jenis modalnya bisa modal asing atau joint venture dengan modal dalam negeri.

2.2. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Sesuai dengan teori-teori pembangunan ekonomi, peranan penting investasi telah dikemukakan oleh ahli ekonomi seperti Solow, Harrod-Domar, dan lain-lain. Investasi berkaitan dengan tabungan dalam negeri karena tabungan dalam negeri merupakan sumber pembiayaan kebutuhan investasi. Di banyak negara sedang berkembang termasuk Indonesia, sumber tersebut sangat terbatas sehingga harus bergantung pada modal asing, baik dalam bentuk pinjaman, bantuan, investasi langsung maupun investasi portofolio. Oleh karena itu setiap negara di dunia ini pasti membutuhkan arus modal yang masuk ke negaranya

sebagai salah satu dana pembangunan perekonomiannya. Bagi negara-negara yang sedang berkembang, aliran modal swasta merupakan kesempatan untuk memperoleh dana pembiayaan pembangunan ekonomi karena masih terbatasnya tabungan dalam negerinya.

Pada setiap momen, persediaan modal adalah determinan output perekonomian yang penting, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Biasanya terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal: investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi mengacu pada penggunaan modal, dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang. (Mankiw N. Gregory, 2003 : 178)

Pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan, dan barang-barang baru akan meningkatkan stok modal (*capital stock*) fisik suatu negara (yaitu jumlah nilai riil bersih dari semua barang-barang modal produktif secara fiskal) sehingga pada gilirannya akan memungkinkan negara tersebut untuk mencapai tingkat output yang lebih besar. Investasi jenis ini sering diklasifikasikan sebagai investasi di sektor produktif (*directly productive activities*). Investasi-investasi lainnya yang dikenal dengan sebutan infrastruktur sosial dan ekonomi (*social overhead capital*) yaitu jalan raya, listrik, air, sanitasi, dan komunikasi akan mempermudah dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan ekonomi. (Lincoln Arsyad, 2000: 214)

Salah satu faktor yang mempengaruhi masuknya PMA ke suatu negara adalah tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut, hubungannya positif artinya semakin baik tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka akan

semakin baik (tinggi) juga aliran PMA ke negara tersebut (Shakrani Saharudin, Mohd, 2002: 12).

2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dikategorikan dalam faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi antara lain ukuran pasar, pendapatan perkapita, tingkat upah, tingkat inflasi dan PDRB, tingkat suku bunga bank, nilai tukar mata uang, tenaga kerja; sedangkan faktor non ekonomi antara lain minat investasi, infrastruktur, kebijakan pemerintah, tingkat sosial masyarakat, informasi tentang investasi, lokasi, beban pungutan non ekonomis, faktor geografis dan stabilitas politik (Anton Agus Setyawan dan Fatchurrohman, 2004: 5).

2.3.1. Penelitian sebelumnya

Beberapa penelitian tentang faktor yang mempengaruhi investasi yang telah dilakukan yaitu :

a. Penelitian Sarwedi 2002

Dengan menggunakan model analisis yang digunakan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel ekonomi (GDP, growth, wage dan ekspor) mempunyai hubungan positif dengan penanaman modal asing, sedangkan variabel non ekonomi yaitu stabilitas politik mempunyai hubungan negatif.

b. Penelitian Ahmad Saprianoor 2006

Dari hasil penelitiannya menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara variabel GDP riil dan tenaga kerja dengan modal asing langsung, hubungan negatif antara variabel infrastruktur dengan PMA langsung, tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat suku bunga dan deregulasi dengan PMA langsung.

c. Penelitian Syafyuddin, 2005

Penelitiannya menghasilkan adanya pengaruh negatif risiko politik dan tingkat upah terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Tidak ditemukannya pengaruh negatif yang signifikan dari nilai tukar mata uang terhadap *foreign direct investment* (FDI) yang mungkin disebabkan oleh adanya data yang tidak stabil yang terjadi pada saat krisis tahun 1997-1998 dan perbedaan metode analisis yang digunakan. Tidak ditemukannya pengaruh negatif yang signifikan dari tingkat inflasi terhadap FDI yang mungkin disebabkan oleh adanya pengaruh pemerintah dalam mengontrol tingkat inflasi terbatas pada kisaran 1 digit dan perbedaan metode analisis yang digunakan *Vector Auto Regression* (VAR). Tidak ditemukannya pengaruh positif yang signifikan dari PDB terhadap FDI yang mungkin disebabkan oleh adanya perbedaan waktu yang digunakan dan metode analisis yang digunakan *Ordinary Least Square* (OLS).

d. Penelitian Reni Harni, 2006

Ditemukan adanya pengaruh negatif dari suku bunga terhadap investasi swasta di Indonesia. PDB mempunyai pengaruh positif terhadap investasi swasta di Indonesia. Investasi asing langsung mempunyai pengaruh positif terhadap investasi swasta di Indonesia.

2.3.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dapat diartikan ke dalam 3 (tiga) pendekatan, yaitu : pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Arti dari pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah pada suatu waktu tertentu (biasanya setahun). Pendekatan pendapatan, PDRB adalah jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha) balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut di dalam proses produksi (upah gaji, sewa tanah, bunga, modal dan keuntungan) di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu (biasanya setahun). Dalam hal ini PDRB juga termasuk penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung netto. Sedangkan dari pendekatan pengeluaran, PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor netto (ekspor dikurangi impor) di suatu wilayah pada periode setahun (BPS, 2005:5). Ekspor netto disini adalah ekspor dikurangi impor.

Ada 2 cara penghitungan PDRB, pertama adalah berdasarkan harga pada tahun berjalan yang disebut PDRB atas dasar harga berlaku yang dihitung dengan

metode langsung dan tidak langsung, sedangkan yang kedua yaitu harga pada tahun dasar yang disebut PDRB atas dasar harga konstan yang dihitung dengan metode revaluasi, ekstrapolasi, deflasi dan deflasi berganda.

Hubungan PDRB dengan investasi didasarkan asumsi rasionalitas, yaitu produsen hanya ingin melakukan investasi selama proyek investasi tersebut diperkirakan akan mendatangkan keuntungan. Indikasi adanya keuntungan yang akan diperoleh dapat dilihat dari adanya permintaan barang dan jasa yang dihasilkan dari proyek investasi cukup memadai. Adanya peningkatan PDRB mengakibatkan permintaan barang dan jasa yang dikonsumsi akan meningkat. Ini berarti bahwa peningkatan PDRB memberikan peluang pada para investor sebagai produsen untuk meningkatkan jumlah proyek-proyek investasinya karena adanya permintaan barang dan jasa. Berdasarkan asumsi tersebut maka PDRB berhubungan positif dengan pengeluaran untuk investasi.

2.3.3. Suku Bunga

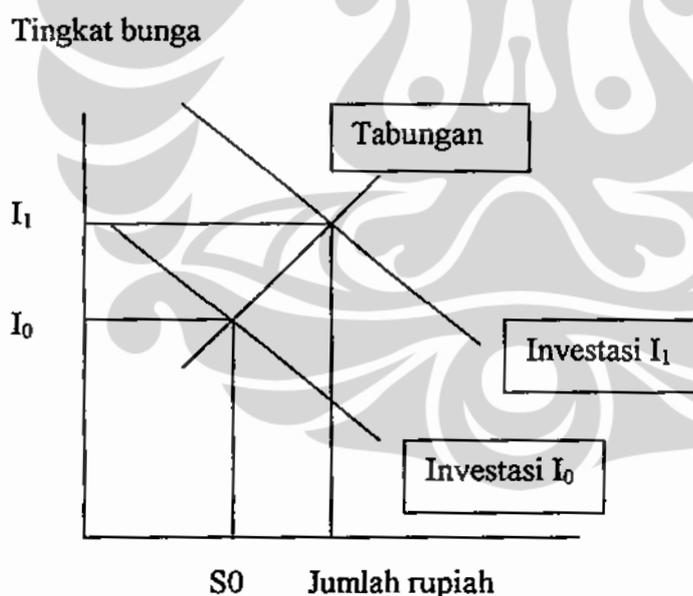
Pembayaran terhadap modal yang dipinjam dari pihak lain dinamakan bunga, biasanya dinyatakan sebagai persentasi dari modal yang dipinjam. Permintaan akan investasi berbanding terbalik dengan suku bunga (Dumairy:116). Hubungan antara tingkat suku bunga dengan keputusan melakukan investasi dapat dijelaskan dengan pendekatan nilai sekarang dan pendekatan tingkat pengembalian modal. Bila tingkat suku bunga naik maka ada proyek investasi yang semula menguntungkan menjadi tidak menguntungkan dan tidak layak untuk dijalankan. Akibatnya permintaan terhadap investasi menjadi berkurang atau bisa diartikan bila tingkat suku bunga naik maka permintaan

investasi akan turun dan sebaliknya bila tingkat suku bunga turun maka permintaan investasi akan naik.

Menurut teori klasik investasi merupakan fungsi dari suku bunga. Makin tinggi suku bunga, keinginan melakukan investasi makin kecil, karena pengusaha akan menambah pengeluaran untuk melakukan investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari suku bunga yang harus dibayar untuk dana investasi tersebut yang merupakan ongkos untuk penggunaan dana. Sebaliknya makin rendah suku bunga, maka pengusaha akan lebih terdorong untuk melakukan investasi ongkos untuk penggunaan dana kecil (Sukirno:377).

Secara grafik keseimbangan suku bunga dapat digambarkan seperti dalam gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1. Teori klasik tentang suku bunga



Sumber : Nopirin:71

Keseimbangan suku bunga ada pada I_0 dimana jumlah tabungan sama dengan investasi. Apabila suku bunga di atas I_0 , jumlah tabungan melebihi keinginan pengusaha untuk melakukan investasi.. Para penabung akan saling

bersaing untuk meminjamkan dananya dan persaingan ini akan menekan suku bunga turun balik ke porsi I_0 . Sebaliknya apabila suku bunga di bawah ini, para pengusaha akan saling bersaing untuk memperoleh dana yang relatif lebih kecil jumlahnya. Persaingan ini akan mendorong suku bunga naik lagi ke I_0 . Kenaikan efisiensi produksi misalnya, akan mengakibatkan keuntungan yang diharapkan naik, sehingga pada suku bunga yang sama pengusaha bersedia meminjam dana lebih besar untuk membiayai investasinya atau untuk dana investasi yang sama jumlahnya pengusaha bersedia membayar suku bunga yang lebih tinggi. Keadaan ini dalam gambar 2.1 ditunjukkan dengan bergesernya kurva permintaan investasi ke kanan atas dan keseimbangan suku bunga yang baru pada titik I_1 . (Nopirin, 1992:72).

Suku bunga menentukan jenis investasi yang akan memberi keuntungan kepada para pengusaha dan dapat dilaksanakan. Para pengusaha hanya akan melaksanakan keinginan mereka untuk menanam modal apabila memperoleh tingkat pengembalian modal dari penanaman modalnya itu (persentase keuntungan bruto modal) lebih besar dari suku bunga. Oleh karena itu dalam analisis makro ekonomi, analisis mengenai investasi lebih ditekankan pada peranan suku bunga dalam menentukan tingkat investasi dan akibat perubahan suku bunga atas investasi dan pendapatan nasional. Bagaimana suku bunga akan menentukan besarnya investasi yang akan dilakukan dalam suatu jangka waktu tertentu? Bagaimanakah investasi akan berubah apabila faktor-faktor yang menentukan investasi mengalami perubahan? Para pengusaha akan melaksanakan investasi yang mereka rencanakan hanya apabila tingkat pengembalian modal yang mereka peroleh melebihi suku bunga. Dengan demikian besarnya investasi

dalam suatu jangka waktu tertentu adalah sama dengan nilai dari seluruh investasi yang tingkat pengembalian modalnya adalah lebih besar atau sama dengan suku bunga.

2.3.4. Nilai Tukar

Bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang biasanya memakai sumber dana dari luar negeri untuk modal pembiayaannya, tidak stabilnya nilai tukar di dalam negeri tidak terlalu masalah. Atau, bagi perusahaan-perusahaan asing yang melakukan kegiatan ekonomi di dalam negeri yang tidak terlalu tergantung pada impor untuk bahan bakunya, mungkin penambahan besarnya bea masuk impor tidak terlalu mengganggu kegiatan mereka. Sebaliknya bagi perusahaan yang bahan bakunya impor maka kenaikan nilai tukar menjadi masalah yang serius karena adanya kenaikan biaya produksi.

2.3.5. Inflasi

Menurut A.P. Lehner inflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan (Excess Demand) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan (Anton H. Gunawan, 1991). Sementara itu Ackley mendefinisikan inflasi sebagai suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat). Menurut definisi ini, kenaikan harga yang sporadis bukan dikatakan sebagai inflasi (Iswardono, 1990). Menurut Boediono (1995) inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari barang-barang lain. Inflasi diakibatkan oleh :

a. Demand-Pull Inflation

Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (aggregate demand), sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Apabila kesempatan kerja penuh (full-employment) telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya hanyalah akan menaikkan harga saja (sering disebut dengan inflasi murni).

b. Cost-Push Inflation

Cost push inflation ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi inflasi yang dibarengi dengan resesi. Keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (aggregate supply) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi akan menaikkan harga dan turunnya produksi.

Tingkat inflasi bisa sangat bergejolak dari tahun ketahun di sejumlah negara, bahkan pada negara berkembang bisa mencapai lebih dari 100 % dalam satu tahun tertentu. Jika ini terjadi tentu saja akan sangat mempengaruhi arus kas dari proyek. Meskipun biaya maupun pendapatan dipengaruhi dalam arah yang sama oleh fluktuasi nilai tukar mata uang, akan tetapi besar pengaruh tersebut mungkin berbeda. Sekalipun laju inflasi yang relatif tinggi menyebabkan valuta melemah, dampaknya atas arus kas netto belum tentu saling menghilangkan.

Penelitian Serven dan Solimano (1992) dalam *Economic Adjustment and Investment Performance* dengan menggunakan data *cross section* dari 15 negara pada tahun 1975-1988 yang menggunakan nilai tukar dan inflasi sebagai froksi

ketidakstabilan untuk mengestimasi persamaan investasi. Kedua ukuran tersebut terbukti mempunyai hubungan yang signifikan dan berdampak negatif terhadap investasi. Selanjutnya menurut Hadjimichael (1995) dalam studinya *Growth Savings and Investment Performance* dari 41 negara berkembang antara tahun 1986-1993 juga mempunyai dampak yang sama.

2.3.6. Infrastruktur/Fasilitas Penunjang

Infrastruktur merupakan keseluruhan elemen yang berguna untuk berfungsinya perekonomian dengan memfasilitasi sirkulasi barang, manusia dan ide. Setiap usaha untuk meningkatkan dan mendiversifikasi produksi, memperluas perdagangan, menyebarkan penduduk, mengurangi kemiskinan, serta memperbaiki kondisi lingkungan, membutuhkan infrastruktur.

Karakteristik infrastruktur adalah eksternalitas baik positif maupun negatif (eksternalitas positif terjadi jika utilitas sosialnya lebih tinggi dari utilitas ekonominya berdasarkan pasar, yang diukur berdasarkan harga atau utilitas marginal dari pembeli), adanya monopoli alamiah yang disebabkan oleh tingginya biaya tetap dan tingkat kepentingannya dalam perekonomian. Selain itu Infrastruktur yang merupakan barang publik juga bersifat non eksklusif (tidak ada orang yang dapat dikesampingkan), non rival (konsumsi seorang individu tidak mengurangi konsumsi individu lainnya) serta umumnya biaya produksi marginal adalah nol. Infrastruktur umumnya juga tidak dapat diperjualbelikan.

Peranan infrastruktur terhadap investasi dapat secara langsung dengan cara mempengaruhi konsumsi final, peningkatan kesejahteraan dan pengeluaran rumah tangga, maupun secara tidak langsung dengan cara memfasilitasi transaksi

di pasar, membuat faktor input ekonomi lainnya menjadi lebih produktif seperti peningkatan skala ekonomi dalam produksi dan eksternalitas pada konsumsi (*spill over* dari pengguna ke non pengguna).

Seorang investor dalam membuat keputusan investasinya biasanya menyertakan pertimbangan mengenai keadaan infrastruktur yang tersedia, karena hal ini dianggap akan mempengaruhi aktivitas investasi yang ditanamkan. Investor akan melakukan banyak pertimbangan ketika akan menanamkan investasinya, terutama dinegara sedang berkembang yang belum mempunyai infrastruktur yang cukup baik, karena akan lebih besar`dana yang harus ditanamkan bukan saja berkaitan dengan investasi yang direncanakan tetapi juga untuk menutupi minimnya infrastruktur tersebut. Infrastruktur dapat berupa panjang jalan yang tersedia, jumlah saluran telepon maupun ketersediaan listrik. Oleh karena itu apabila suatu daerah memiliki infrastruktur yang baik akan dapat menarik investasi yang masuk, karena dapat menunjang operasional perusahaan tersebut.

2.3.7. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan dan perilaku yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung biaya investasi adalah mulai dari korupsi, besarnya tarif dan sistem perpajakan yang tidak kondusif, jasa-jasa publik, kebijakan perdagangan mengenai bea masuk impor, birokrasi dalam pengurusan izin, kebijakan moneter yang mempengaruhi tingkat suku bunga dan inflasi, hingga pengeluaran pemerintah untuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur. Besarnya pengaruh dari semua ini terhadap biaya investasi tentu bervariasi

menurut sektor atau jenis kegiatan ekonomi dan kondisi (terutama keuangan) perusahaan yang melakukan investasi. Oleh karena itu, usaha pemerintah, sebaik apapun juga, untuk menciptakan investasi, atau menarik masuk PMA tidak akan berhasil tanpa mempertimbangkan lingkungan bisnis di sektor yang menjadi tujuan investasi dan konteks dari suatu pembangunan ekonomi yang lebih luas yang menciptakan "aturan main" untuk semua kegiatan/jenis usaha dan yang mana mempengaruhi cara bisnis dan pasar bekerja.

Lingkungan di mana bisnis beroperasi dapat dibagi dalam dua macam, yakni lingkungan langsung dan lingkungan yang lebih luas. Lingkungan yang lebih luas adalah lingkungan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap suatu kegiatan bisnis, yang terdiri dari komponen-komponen berikut: ekonomi makro (seperti kebijakan perdagangan, kebijakan industri, kebijakan sektor keuangan, dan kebijakan moneter dan fiskal), pemerintah dan politik pada tingkat nasional dan lokal (misalnya legislatif dan proses pembuatan kebijakan, judisiari, dan keamanan serta stabilitas), jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah (seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, utilitas dan jasa keamanan), pengaruh-pengaruh eksternal (seperti perdagangan global, bantuan luar negeri, tren dan selera masyarakat dunia, teknologi, dan informasi), sosial dan kultur (seperti demografi, selera konsumen, dan sikap terhadap bisnis), dan iklim serta lingkungan alam (misalnya sumber daya alam, cuaca, dan siklus pertanian). Sedangkan, yang dimaksud lingkungan langsung adalah lingkungan berpengaruh secara langsung terhadap semua kegiatan usaha, yakni pasar (misalnya konsumen, tenaga kerja, keterampilan dan teknologi, material dan alat-alat produksi, lokasi, infrastruktur, modal, dan jaringan-jaringan kerja), regulasi dan

birokrasi (seperti undang-undang, peraturan-peraturan, tarif pajak dan sistem perpajakan, lisensi dan perijinan, standar produk dan proses, dan perlindungan konsumen dan lingkungan), dan intervensi-intervensi yang didanai oleh uang publik (seperti jasa keuangan untuk bisnis).

Implikasi dari kenyataan di atas terhadap kebijakan investasi adalah jelas bahwa kebijakan tersebut tidak akan membawa suatu hasil yang efektif, dalam arti investasi tidak akan meningkat jika tidak didukung oleh kebijakan-kebijakan lain yang mempengaruhi komponen-komponen lain dari lingkungan usaha. Misalnya, di satu sisi, pemerintah ingin meningkatkan investasi di dalam negeri dengan memberikan insentif pajak bagi perusahaan-perusahaan baru atau perusahaan-perusahaan yang mau memperluas kapasitas produksinya, sementara, di sisi lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan perdagangan yang menghapuskan bea impor bagi suatu produk yang kebetulan adalah produk yang menarik bagi calon-calon investor. Contoh lainnya, walaupun banyak insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada investor, investasi tidak akan meningkat atau PMA, khususnya industri-industri yang bersifat *footloose* seperti elektronik dan tekstil, tidak akan memilih Indonesia sebagai tempat kegiatannya selama kondisi infrastruktur belum baik atau tingkat sumber daya manusia (SDM) di Indonesia semakin buruk relatif dibandingkan di negara-negara tetangga. Dengan kemajuan teknologi dan dalam era perdagangan bebas, faktor-faktor keunggulan kompetitif menjadi lebih penting daripada faktor-faktor keunggulan komparatif dalam mempengaruhi mobilisasi investasi lintas negara/wilayah.

Selama 2006 pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian. Beberapa paket kebijakan di bidang

industri dan perdagangan, infrastruktur dan iklim investasi telah digulirkan, meskipun belum sepenuhnya dapat diimplementasikan sesuai rencana. Untuk meningkatkan investasi maka pada bulan Maret 2006 pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan investasi baru melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2006 yang antara lain mencakup bidang umum, perpajakan, kepabeanan, ketenagakerjaan, UKM. Paket ini memuat matriks program berisi serangkaian tindakan, hasil yang dituju, target waktu dan penanggungjawab setiap komponen. Langkah tersebut meliputi upaya memperkuat kelembagaan pelayanan investasi dan sinkronisasi peraturan pusat dan daerah, kepabeanan dan cukai, perpajakan, ketenagakerjaan, serta usaha kecil, menengah dan koperasi.

Salah satu tindakan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi adalah menyederhanakan proses pembentukan perusahaan dan izin usaha. Keluaran yang diharapkan dari tindakan tersebut adalah berkurangnya waktu yang dibutuhkan secara bertahap dari rata-rata 150 hari menjadi 30 hari. Hal ini ditempuh antara lain dengan pendelegasian wewenang pengesahan badan hukum kepada Kantor Wilayah dan Hak Azasi Manusia di propinsi. Pembetulan perpajakan dalam paket tersebut terkait dengan target menyelesaikan amandemen tiga undang-undang (UU), yakni UU Ketentuan Umum Perpajakan, UU Pajak Penghasilan, dan UU Pajak pertambahan Nilai. Dalam paket tersebut diatur revisi, terutama yang berhubungan dengan ketentuan umum perpajakan. Paket kebijakan yang berhubungan dengan bea masuk dan cukai terkait dengan target percepatan sistem pelayanan satu jendela melalui berbagai macam modernisasi. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan jumlah perusahaan yang masuk kedalam jalur

prioritas yaitu perusahaan yang mendapatkan pelayanan lebih cepat tanpa terlalu banyak pemeriksaan.

Dibidang industri dan perdagangan, berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain berupa harmonisasi tarif untuk mengurangi distorsi tata niaga, pencabutan tarif multiguna listrik dan peraturan di bidang perijinan perdagangan. Beberapa implementasi kebijakan tersebut antara lain meliputi percepatan pengurusan dokumen impor, pengurusan ijin usaha dan penanganan pengembalian pajak. Sementara itu berbagai peraturan di bidang pengembangan infrastruktur telah dikeluarkan seperti kebijakan strategis lintas sektoral serta transaksi proyek pembangunan infrastruktur.

2.4. Ketahanan Nasional dan Ketahanan Daerah

2.4.1. Pengertian Ketahanan Nasional

Menurut rumusan dari Lembaga Ketahanan Nasional yang kemudian diakomodasikan dalam Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor : Skep/1328/XII/1974, Ketahanan Nasional didefinisikan sebagai berikut :

“ Kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang menganaung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya” (Sunardi RM,2004:4-5).

Menurut Lepi T Tarmidi (1995; 2) Ketahanan Nasional mengandung arti daya tahan bangsa secara non fisik dalam berbagai aspek kehidupan yaitu mencakup asta gatra atau delapan gatra yakni : letak geografis, keadaan kekayaan

alam, keadaan kependudukan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan militer atau hankam.

Sementara menurut Wan Usman, Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamis suatu bangsa meliputi semua aspek kehidupan untuk tetap jaya, di tengah keteraturan dan perubahan yang selalu ada (Wan Usman dkk,2003: 3). Selanjutnya konsep Ketahanan Nasional menurut Wan Usman dilatarbelakangi oleh :

- a. Kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya.
- b. Kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar
- c. Ketahanan (kemampuan) suatu bangsa untuk tetap jaya, mengandung makna keteraturan (*regularitas*) dan stabilitas yang di dalamnya terdapat potensi untuk terjadinya perubahan (*the stability idea of changes*)

Ketahanan nasional dapat dipandang sebagai suatu mata uang dengan dua sisi yaitu keamanan dan kesejahteraan. Keduanya harus berjalan seimbang dimana kesejahteraan dan keamanan mengandung muatan utama yakni partisipasi masyarakat yang demokratis (Wan Usman: 93). Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara kesejahteraan dan keamanan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kesejahteraan dapat terwujud bila keamanan dapat

terkendali dan sebaliknya stabilitas keamanan akan terganggu bila kesejahteraan masyarakat tidak terpenuhi.

Pendekatan kesejahteraan dan keamanan mengandung arti bahwa kebulatan dari kesejahteraan dan keamanan mempunyai beberapa parameter, diantaranya adalah pemerataan kecukupan kebutuhan fisiologik perorangan (sandang, pangan, papan), keselamatan masyarakat dari bencana alam dan ancaman, serta gangguan fisik atau psikologik pihak lain (Soewarso : 1982, 30-31). Dengan demikian pemerataan kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kesejahteraan dan keamanan merupakan azas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan sistem kehidupan nasional tidak akan berlangsung sehingga kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri.

Dalam realisasinya kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitikberatkan pada pemerataan kesejahteraan tetapi tidak berarti mengabaikan keamanan. Sebaliknya memberikan prioritas pada keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Kedua pendekatan tersebut merupakan dua hal yang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan, baik kesejahteraan maupun keamanan harus selalu berdampingan dalam kondisi apapun. Dalam kehidupan nasional kesejahteraan dan keamanan nasional dipadukan secara serasi menjadi suatu tolok ukur ketahanan nasional (Lemhannas : 1993, 20-22)

Menurut Hasnan Habib (1997, 37-39) doktrin ketahanan nasional (Tannas) mulai disusun secara sistematis pada permulaan Orde Baru. Habib mengacu pada upaya membangun kemampuan nasional yang diharapkan dapat mengatasi segala macam dan bentuk tantangan (ancaman, hambatan, gangguan) eksternal dan internal, yang diperkirakan dapat dihadapi oleh negara dan bangsa dalam suatu kurun waktu tertentu. Kemampuan ini terdiri dari:

1. Kemampuan negatif/destruktif, yaitu kemampuan meniadakan/menghancurkan/mengatasi ancaman, titik berat upaya diletakkan pada aspek keamanan;
2. Kemampuan positif/konstruktif, yaitu kemampuan membangun dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat; titik berat upaya diletakkan pada aspek kesejahteraan

Sasaran kedua kemampuan tersebut di atas yang menghasilkan Tannas yang dibangun sekaligus melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan. Adanya kelangkaan sumber daya nasional mengharuskan menerapkan prinsip *ambeg parama arta dalam* menentukan sumber daya langka tersebut. Prioritas ditentukan berdasarkan situasi keamanan nasional yang berlaku, maupun yang dapat diperkirakan akan berlaku selama suatu kurun waktu tertentu. Dalam keadaan suatu agresi militer merupakan ancaman yang serius, misalnya aspek keamanan menjadi prioritas, namun tidak berarti pembangunan kekuatan militer yang besar merupakan satu-satunya jawaban terhadap ancaman tersebut.

Kombinasi kekuatan militer yang wajar dengan kegiatan diplomasi yang canggih, mungkin sekali lebih efektif dan efisien untuk menangkal atau

menetralsir suatu ancaman agresi militer. Demikian pula, jika diperkirakan keresahan masyarakat menjurus ke arah terganggunya stabilitas dan keamanan, maka aspek keamanan juga akan menjadi prioritas lebih tinggi. Hal ini tidak berarti peningkatan intensitas aparaturnya keamanan negara untuk mengendalikan dan mengawasi masyarakat, namun mungkin justru masalah keadilan dan pemerataan harus lebih diupayakan. Sebaliknya dalam keadaan damai, aspek kesejahteraan harus menjadi prioritas. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, semakin tinggi pula komitmennya untuk mempertahankan dan mengamankan kondisi dan tingkat hidup yang sejahtera itu.

Pada hakikatnya ini berarti bahwa semua unsur kekuatan nasional (yang dalam sistem disebut *asta-grata*) yang terdiri dari unsur-unsur yang dikelompokkan menurut sistematika : konsistensi geografi, sumber daya alam, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan-keamanan atau kemampuan militer) harus dikembangkan melalui pembangunan nasional semesta, terencana sedemikian rupa sehingga mampu mengatasi masalah keamanan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap tiap aspek/elemen kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi ketahanan geografi, ketahanan sumber daya alam (lingkungan), ketahanan demografi, ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan/militer.

Menurut RM. Sunardi (2004; 6), Ketahanan nasional memiliki unsur keuletan dan ketangguhan bangsa yang merupakan kualitas integral keduanya terhadap seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Keuletan menggambarkan sikap mampu bertahan dalam kondisi bagaimanapun, sedangkan

ketangguhan lebih mencerminkan pada upaya untuk mengembangkan diri dalam mewujudkan tujuannya.

Sumitro Djojohadikusumo dalam Lepi T Tarmidi (1995;2) menekankan hakekat ketahanan nasional sebagai daya tahan masyarakat, dengan menyebutkan "Kita harus bertahan dalam proses pergolakan yang terkandung dalam perkembangan masa depan. Bersamaan dengan itu sekaligus kita harus berdaya untuk meningkatkan taraf hidup penduduk Indonesia, agar akhirnya rakyat kita bisa hidup sejahtera dalam suatu masyarakat yang adil dan makmur".

Dipandang dari struktur teritorial negara, ketahanan nasional merupakan integrasi dari ketahanan wilayah-wilayahnya. Pembagian wilayah yang dimaksud, adalah wilayah besar dan berjenjang sampai wilayah terkecil (propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa).

2.4.2. Ketahanan Daerah

Berdasarkan definisi ketahanan nasional maka konsep ketahanan daerah pada prinsipnya sama dengan konsep ketahanan nasional, yaitu merupakan kondisi dinamis suatu daerah yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan daerah dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari daerah itu sendiri maupun dari luar daerah baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelangsungan kehidupan daerah dalam mencapai tujuannya. Ketahanan daerah merupakan bagian integral dari ketahanan nasional yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mendukung. Ketahanan nasional akan tinggi bila didukung oleh ketahanan daerah yang mantap begitu pula sebaliknya

ketahanan daerah akan terwujud jika didukung oleh ketahanan nasional yang tinggi.

Hakekat ketahanan daerah dapat didefinisikan sebagai kemampuan daerah dalam mengelola segala aspek kehidupan di daerahnya, meliputi aspek alamiah dan sosial menuju terwujudnya keuletan dan ketangguhan daerah tersebut.

2.5. Ketahanan Ekonomi Sebagai Unsur Ketahanan Daerah

Bila ditinjau dari sisi ekonomi maka ketahanan nasional adalah identik dengan ketahanan ekonomi nasional (Bambang Sudibyo,17). Hal ini didasarkan pada berbagai dimensi yang terkait dengan ekonomi, yang meliputi :

1. Stabilitas ekonomi
2. Tingkat integrasi ekonomi
3. Ketahanan sistem ekonomi terhadap guncangan dari luar sistem ekonomi
4. Margin of safety dari garis kemiskinan
5. Keunggulan kompetitif produk-produk ekonomi nasional
6. Pertumbuhan ekonomi
7. Kemantapan ekonomi dari segi besarnya perekonomian
8. Tingkat integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global

Banyaknya dimensi ekonomi ini, menunjukkan pentingnya fungsi ekonomi dalam sistem ketahanan nasional. Dengan demikian pada prinsipnya, aspek ekonomi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka

dapat diperkirakan bahwa peluang kesejahteraan semakin besar. Untuk mendorong pertumbuhan tersebut investasi memegang peranan yang sangat penting karena dengan investasi diharapkan terjadi peningkatan produksi.

Pertumbuhan ekonomi tidak berdiri sendiri pada peningkatan kesejahteraan, kesejahteraan berdimensi luas mencakup pemerataan pendapatan dan kesempatan. Pertumbuhan tanpa pemerataan akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan. Kesenjangan akan berakibat frustrasi dan mengarah pada aksi destruktif yang bisa meniadakan hasil pembangunan. Dalam ketahanan nasional pertumbuhan diintegrasikan dengan aspek pemerataan, dengan tujuan mendorong kesejahteraan sekaligus keamanan. Investasi sebagai kegiatan pertumbuhan diarahkan pada pemerataan. Dengan demikian investasi berfungsi positif pada peningkatan ketahanan nasional.

BAB III

PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI KABUPATEN BOGOR

3.1. Sejarah Singkat

Pada tahun 1745, cikal bakal masyarakat Bogor semula berasal dari sembilan kelompok pemukiman yang digabungkan oleh Gubernur Baron Van Inhof menjadi inti kesatuan masyarakat Kabupaten Bogor. Pada waktu itu Bupati Demang Wartawangsa berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat yang berbasis pertanian dengan menggali terusan dari Ciliwung ke Cimahpar dan dari Nanggewer sampai ke Kalibaru/Kalimulya. Penggalan untuk membuat terusan kali dilanjutkan di sekitar pusat pemerintahan, namun pada tahun 1754 pusat pemerintahan yang terletak di Tanah Baru kemudian dipindahkan ke Sukaati (Kampung Empang sekarang).

Terdapat berbagai pendapat tentang lahirnya nama Bogor itu sendiri. Salah satu pendapat menyatakan bahwa nama Bogor berasal dari kata Bahai atau Baqar yang berarti sapi dengan alasan terdapat bukti berupa patung sapi di Kebun Raya Bogor. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa nama Bogor berasal dari kata Bokor yang berarti tunggul pohon enau (kawung).

Pendapat di atas memiliki dasar dan alasan tersendiri diyakini kebenarannya oleh setiap ahlinya. Namun berdasarkan catatan sejarah bahwa pada tanggal 7 April 1752 telah muncul kata Bogor dalam sebuah dokumen dan tertulis *Hoofd Van de Negorij Bogor*, yang berarti kepala kampung Bogor. Pada dokumen tersebut diketahui juga bahwa kepala kampung itu terletak di dalam lokasi Kebun Raya itu sendiri yang mulai dibangun pada tahun 1817.

Perjalanan sejarah Kabupaten Bogor memiliki keterkaitan yang erat dengan zaman kerajaan yang pernah memerintah di wilayah tersebut. Pada empat abad sebelumnya, Sri Baduga Maharaja dikenal sebagai raja yang mengawali zaman kerajaan Pajajaran, raja tersebut terkenal dengan "ajaran dari leluhur yang dijunjung tinggi yang mengejar kesejahteraan". Sejak saat itu secara berturut-turut tercatat dalam sejarah adanya kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah tersebut, yaitu: Kerajaan Tarumanegara, diperintah oleh 12 orang raja. Berkuasa sejak tahun 358 sampai dengan tahun 669. Kerajaan Galuh, diperintah oleh 14 raja. Berkuasa sejak 516 hingga tahun 852. Kerajaan Sunda, diperintah oleh 28 raja, bertahta sejak tahun 669 sampai dengan tahun 1333. Kemudian dilanjutkan Kerajaan Kawali yang diperintah oleh 6 orang raja berlangsung sejak tahun 1333 hingga 1482. Kerajaan Pajajaran, berkuasa sejak tahun 1482 hingga tahun 1579. Pelantikan raja yang terkenal sebagai Sri Baduga Maharaja, menjadi satu perhatian khusus. Pada waktu itu terkenal dengan upacara Kuwedabhakti, dilangsungkan tanggal 3 Juni 1482.

Tanggal itulah kiranya yang kemudian ditetapkan sebagai hari Jadi Bogor yang secara resmi dikukuhkan melalui sidang pleno DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor pada tanggal 26 Mei 1972. Pada tahun 1975, Pemerintah Pusat (dalam hal ini Menteri Dalam Negeri) menginstruksikan bahwa Kabupaten Bogor harus memiliki Pusat Pemerintahan di wilayah kabupaten sendiri dan pindah dari pusat pemerintahan Kotamadya Bogor. Atas dasar tersebut, pemerintah Daerah Tingkat II Bogor mengadakan penelitian di beberapa wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor untuk dijadikan calon ibu kota sekaligus berperan sebagai pusat pemerintahan. Alternatif lokasi yang akan dipilih diantaranya adalah wilayah

Kecamatan Ciawi (Rancamaya), Leuwiliang, Parung dan Kecamatan Cibinong (DesaTengah). Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa yang diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapat persetujuan sebagai calon ibu kota adalah Rancamaya wilayah Kecamatan Ciawi. Akan tetapi pemerintah pusat menilai bahwa Rancamaya masih relatif dekat letaknya dengan pusat pemerintahan Kotamadya Bogor dan dikhawatirkan akan masuk ke dalam rencana perluasan dan pengembangan wilayah Kota madya Bogor. Oleh karena itu atas petunjuk pemerintah pusat, pemerintah Daerah Tingkat II Bogor disarankan agar mengambil salah satu alternatif wilayah dari hasil penelitian lainnya. Dalam sidang Pleno DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tahun 1980, ditetapkan bahwa calon ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor terletak di Desa Tengah Kecamatan Cibinong. Penetapan calon ibu kota ini diusulkan kembali ke pemerintah pusat dan mendapat persetujuan serta dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, yang menegaskan bahwa ibu kota pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor berkedudukan di Desa Tengah Kecamatan Cibinong. Sejak saat itu dimulailah rencana persiapan pembangunan pusat pemerintahan ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan pada tanggal 5 Oktober 1985 dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor pada saat itu.

3.2. Letak dan Luas Wilayah

Lokasi kabupaten Bogor berdekatan dengan Jakarta, kurang lebih 60 km dan memiliki wilayah seluas 2.371 km². Kabupaten Bogor seperti halnya kabupaten Bekasi, Tangerang merupakan daerah penyangga Kota Jakarta.

Penduduk kabupaten Bogor mengalami kenaikan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2007 jumlah penduduk mencapai 4.251.838 jiwa yang terdiri atas penduduk laki-laki 2.163.853 jiwa dan perempuan 2.051.583 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. di bawah ini

Tabel 3.1. Jumlah penduduk kabupaten Bogor tahun 1999-2007

Tahun	Jumlah Penduduk
1999	3.004.444
2000	3.100.154
2001	3.170.400
2002	3.249.781
2003	3.408.810
2004	3.438.055
2005	3.700.207
2006	4.215.436
2007	4.251.838

Sumber : BPS Kabupaten Bogor

Pusat pemerintahan Kabupaten Bogor berada di Cibinong dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kota Depok
- Sebelah Barat : Kabupaten Lebak
- Sebelah Barat Daya : Kabupaten Tangerang
- Sebelah Timur : Kabupaten Purwakarta
- Sebelah Timur Laut : Kabupaten Bekasi
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukabumi
- Sebelah Tenggara : Kabupaten Cianjur

Pada tahun 2000 terjadi pemecahan wilayah yaitu Kotip Depok sekarang dikenal sebagai Kota Depok terpisah dari kabupaten Bogor. Beberapa kecamatan yang semula menjadi wilayah kabupaten Bogor selanjutnya menjadi daerah Kota Depok yaitu : Kecamatan Beji, Cimanggis, Limo, Pancoran Mas, Sawangan dan Sukmajaya.

Berdasarkan hasil Pendataan Sosial Ekonomi 2005, Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan, 427 desa/kelurahan, 13.541 RT dan 913.206 rumah tangga. Dari jumlah tersebut 234 desa mempunyai ketinggian sekitar kurang dari 500 m diatas permukaan laut (dpl), 144 desa diantara 500-700 m dan sisanya 49 desa sekitar lebih dari 700 m dpl. Hampir sebagian besar desa pada Kabupaten Bogor sudah terklasifikasi sebagai desa Swakarya yakni 236 desa, lainnya 191 desa Swasembada dan tidak ada desa Swadaya. Berdasarkan klasifikasi daerah, dilihat dari aspek potensi lapangan usaha, kepadatan penduduk dan sosial terdapat kategori desa perkotaan sebanyak 199 dan desa pedesaan sebanyak 228 desa.

Kabupaten Bogor dibagi dalam perwilayahan pembangunan yang merupakan dasar penyusunan agenda pembangunan dan rencana strategis setiap bidang dan program pembangunan dalam rangka penyeimbangan pembangunan antar wilayah. Maksud dan tujuan perwilayahan pembangunan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah secara seimbang antar kawasan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan berkesinambungan. Dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan perkembangan ekonomi wilayah, pola interaksi internal dan eksternal yang didukung oleh jaringan infrastruktur pelayanan baik lokal maupun regional serta kebijakan pengembangan dan

penyebaran penduduk secara seimbang sesuai dengan daya dukung lingkungan, maka wilayah Kabupaten Bogor dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah pembangunan, yaitu: wilayah pembangunan barat, tengah dan timur.

Pembangunan wilayah barat meliputi 13 (tiga belas) kecamatan, yaitu kecamatan Jasinga, Parung Panjang, Tenjo, Cigudeg, Sukajaya, Nanggung, Leuwiliang, Leuwisadeng, Tenjolaya, Cibungbulang, Ciampea, Pamijahan dan Kecamatan Rumpin, dengan luas wilayah sekitar 128.750 Ha. Pembangunan wilayah tengah meliputi 20 (dua puluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Sindur, Parung, Ciseeng, Kemang, Rancabungur, Bojonggede, Tajurhalang, Cibinong, Sukaraja, Dramaga, Cijeruk, Cigombong, Caringin, Ciawi, Megamendung, Cisarua, Citeureup, Babakan Madang, Ciomas dan kecamatan Tamansari, dengan luas wilayah sekitar 87.552 Ha. Pembangunan wilayah timur meliputi 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Putri, Cileungsi, Klapanunggal, Jonggol, Sukamakmur, Tanjungsari dan Kecamatan Cariu.

Masyarakat Kabupaten Bogor memiliki beberapa karakteristik yaitu: wilayah Bogor bagian utara corak penduduknya adalah Betawi Ora (atau campuran suku Betawi dan Sunda); wilayah Bogor bagian selatan corak dan bahasa penduduknya adalah campuran antara Bogor dengan Cianjur dan Sukabumi; sebelah barat corak dan bahasa penduduknya campuran antara Bogor dan Banten; bagian timur corak dan bahasa penduduknya campuran Bogor dengan Karawang, sedikit dengan Cianjur dan Bekasi.

3.3. Perekonomian Kabupaten Bogor

Dari data Pemerintah kabupaten Bogor, secara umum seluruh sektor lapangan usaha mengalami kenaikan di kabupaten Bogor, dengan laju pertumbuhan ekonomi riil dari 5,51% pada tahun 2004 menjadi 5,28% pada tahun 2005. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki tingkat pertumbuhan terbesar kedua setelah sektor industri pada tahun 2005, yaitu sebesar 8,01 % dan merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar kedua setelah sektor industri, yaitu sebesar 17,07 %. Sedangkan peningkatan sektor industri yaitu dari nilai investasi sebesar Rp. 1,6 trilyun pada tahun 2001 menjadi Rp. 2,1 trilyun pada tahun 2005. Jumlah unit usaha di sektor ini hingga tahun 2005 sebesar 1.783 unit terdiri dari 538 unit usaha menengah dan besar serta 1.245 unit usaha kecil.

Peningkatan perekonomian Kabupaten Bogor salah satunya disebabkan oleh adanya investasi. Investasi tersebut terdiri dari PMA dan PMDN yang berjumlah 68 usaha tetap untuk PMDN dan 253 usaha tetap untuk PMA sejak tahun 1998 hingga tahun 2008, dengan nilai investasi yang berfluktuasi seperti yang tercantum pada Tabel 3.2 dan 3.3. di halaman 52 dan 53.

Tabel 3.2. Nilai investasi PMDN Tahun 1998-2008

Tahun	Total	
	Jumlah Izin Usaha Tetap	Nilai Investasi (Dalam milyar Rp)
1998	9	412,2
1999	11	158,8
2000	8	189,7
2001	2	52,6
2002	4	5.621,2
2003	4	44,5
2004	6	193,1
2005	9	167,1
2006	1	6,4
2007	5	180,0
2008	9	340,9
Total	68	7.367,0

Sumber : BKPM

Dari tabel tersebut di atas terlihat investasi tertinggi untuk PMDN terjadi pada tahun 2002 senilai Rp. 5,62 trilyun, meskipun jumlah Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan oleh BKPM pada tahun tersebut hanya 4 (empat) dibandingkan dengan tahun 1999 jumlah Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan oleh BKPM ada 11 namun nilai investasi hanya Rp. 158 milyar. Sedangkan investasi tertinggi untuk PMA terjadi pada tahun 2000 senilai 431 juta US\$ seperti yang tercantum pada Tabel 3.3. di halaman 53.

Tabel 3.3. Nilai investasi PMA Tahun 1998-2008

Tahun	Total	
	Jumlah Izin Usaha Tetap	Nilai Investasi (Dalam juta \$)
1998	23	200,2
1999	22	177,4
2000	26	431,9
2001	11	14,5
2002	21	100,1
2003	21	90,0
2004	19	119,0
2005	21	64,1
2006	32	216,7
2007	24	131,1
2008	33	134,8
Total	253	1.680,2

Sumber : BKPM

Adanya investasi ini baik langsung atau tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Bogor. Hal ini tentunya sesuai dengan konsepsi ketahanan nasional yang menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Meningkatnya kesejahteraan wilayah atau daerah akan meningkatkan ketahanan wilayah dan pada gilirannya akan meningkatkan ketahanan nasional. Kesejahteraan dan keamanan ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu, dan sebaliknya penyelenggaraan keamanan memerlukan tingkat kesejahteraan tertentu. Pada dasarnya kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada dalam kehidupan nasional, sehingga sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung tanpa keduanya. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional merupakan tolok ukur ketahanan nasional. Peran masing-masing gatra dalam astagrata seimbang dan saling mengisi.

Maksudnya antargatra mempunyai hubungan yang saling terkait dan saling bergantung secara utuh menyeluruh membentuk tata laku masyarakat dalam kehidupan nasional.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten yang menjadi tujuan investasi di Jawa Barat, hal ini telah dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Untuk memetakan dan mengetahui hubungan antara pola investasi di suatu wilayah dengan struktur PDRB di wilayah tersebut. Bank Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung telah melakukan penelitian di wilayah Jawa Barat (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Kota Bogor) dengan struktur PDRBnya. Satu dari 5 hal yang ditunjukkan dari survei ini yaitu investasi PMA/PMDN di Jawa Barat terpusat di wilayah Bogor, Bekasi, Bandung, Karawang, terkonsentrasi di sektor manufaktur. Perkonomian di Jawa Barat berbasis kepada sektor industri pengolahan, oleh karena itu wilayah di atas mendominasi kontribusi pembentukan PDRB (Bank Indonesia, 2006: 30).

3.3.1. PDRB Kabupaten Bogor

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu dapat dilihat dari data PDRB. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Nilai PDRB kabupaten Bogor selama 10 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 1998 sampai dengan

tahun 2007 yaitu dari Rp. 5,376 trilyun hingga mencapai Rp. 28,15 trilyun, seperti yang terlihat pada Tabel 3.4. di bawah ini.

Tabel 3.4. Nilai PDRB Riil Kabupaten Bogor atas dasar harga konstan Tahun 1998 – 2007

Tahun	Nilai PDRB (milyar Rp.)
1998	5.376,8
1999	9.901,1
2000	10.597,7
2001	20.081,7
2002	20.115,2
2003	21.083,3
2004	23.671,4
2005	25.056,3
2006	26.546,1
2007	28.150,7

Sumber : BPS

Pada tabel 3.4 terlihat bahwa nilai PDRB riil Kabupaten Bogor pada tahun 2001 mengalami kenaikan yang paling tinggi mencapai 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2000). Namun pada tahun 2002 kenaikannya kecil. Terdapat tiga sektor andalan penyumbang terbesar kenaikan PDRB riil tersebut yakni sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian. Sektor pendukung lainnya adalah sektor jasa, sektor bangunan, sektor listrik, gas dan air minum, pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan persewaan dan sektor dengan peranan terkecil yakni pertambangan seperti yang tercantum pada Tabel 3.5. di halaman 56

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Bogor yang tinggi tentunya merupakan potensi yang menguntungkan bagi pemerintah daerah untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun ketahun. PAD merupakan komponen pendapatan daerah kabupaten Bogor yang penting terutama setelah diberlakukannya otonomi daerah.

Tabel 3.5. PDRB Kabupaten Bogor Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan tahun 2001 – 2007 (dalam milyar rupiah)

No	Lapangan Usaha	Tahun						
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1.	Pertanian	463,5	471,4	475,9	1.343,3	1.383,0	1.366,3	1.429,5
2.	Pertambangan dan penggalan	71,5	69,5	72,7	314,5	282,7	307,4	321,4
3.	Industri	2.264,3	2.364,4	2.463,8	14.967,0	15.851,1	16.790,9	17.687,4
4.	Listrik, Gas dan Air minum	248,1	267,7	288,5	837,8	898,4	968,6	1.046,3
5.	Bangunan	222,2	231,0	239,3	727,5	764,8	802,8	855,4
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	527,3	547,9	581,8	3.478,3	3.761,1	4.603,1	4.403,7
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	187,0	201,7	214,7	617,2	662,3	715,4	782,1
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	155,9	166,9	175,2	393,1	418,2	446,6	480,6
9.	Jasa	321,0	339,7	359,0	992,2	1.034,4	1.084,7	1.143,8
	PDRB	20.081,8	20.115,2	21.083,3	23.671,4	25.056,3	26.546,1	28.150,6

Sumber : BPS

PAD kabupaten Bogor selalu mengalami kenaikan dalam 10 tahun terakhir yaitu sebesar Rp 62,4 milyar pada tahun 1998 meningkat menjadi Rp 265,3 milyar pada tahun 2007. Jika dihitung persentase PAD terhadap PDRB mulai tahun 2004 sampai tahun 2007 cenderung mengalami kenaikan meskipun dari tahun 1998 hingga tahun 2003 berfluktuasi, hal terlihat pada Tabel 3.6. di bawah ini.

Tab 3.6. Perbandingan PAD dengan PDRB Tahun 1998 - 2007

Tahun	PAD (milyar Rp)	PDRB (milyar Rp)	% terhadap PDRB
1998	62,4	5.376,8	0,01
1999	69,9	9.901,1	0,70
2000	70,8	10.597,7	0,66
2001	86,9	20.081,7	0,43
2002	122,3	20.115,2	0,60
2003	148,9	21.083,3	0,70
2004	166,2	23.671,4	0,70
2005	186,1	25.056,3	0,74
2006	232,1	26.546,1	0,87
2007	265,3	28.150,7	0,94

Sumber : BPS

3.3.2. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor

Laju pertumbuhan adalah besarnya persentase kenaikan PDRB pada tahun berjalan terhadap PDRB pada tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan atas harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator

perkembangan ekonomi suatu daerah maka disebut juga laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Indikator ini menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

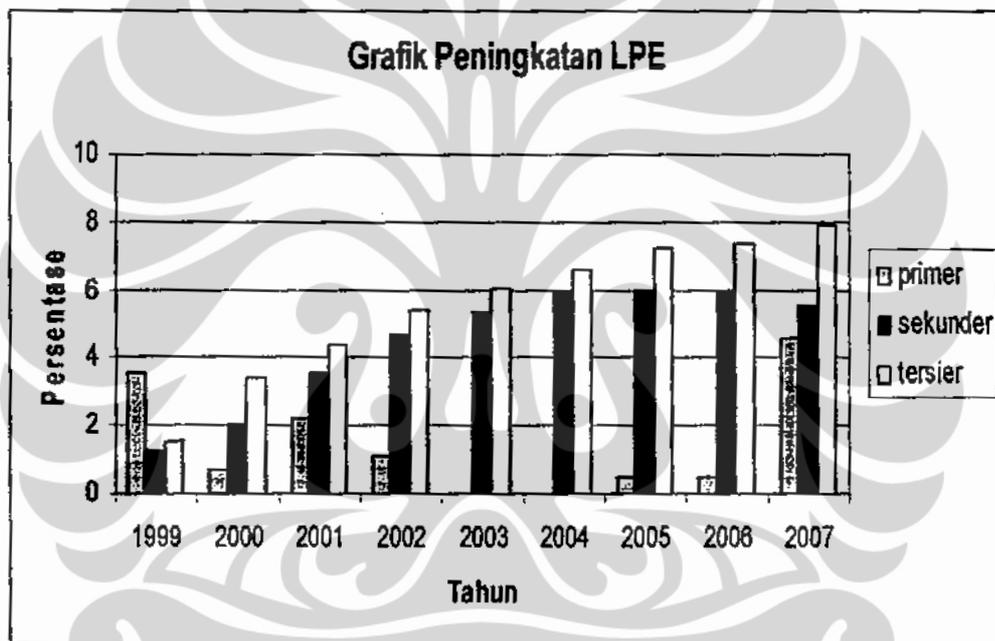
Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor mengalami peningkatan setelah krisis ekonomi pada tahun 1998. Pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi kabupaten Bogor mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun sebelumnya yaitu sebesar -17,71 %. Hal ini disebabkan terjadinya krisis ekonomi yang dialami hampir seluruh daerah di Indonesia. Namun secara bertahap terjadi perbaikan perekonomian sehingga pada tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka positif.

Pada tahun 2002 laju pertumbuhan ekonomi mencapai angka 4,46 persen. Angka ini menunjukkan keberhasilan pemulihan ekonomi di kabupaten Bogor, bahkan sudah dapat mencapai kondisi yang lebih baik dari pada sebelum krisis ekonomi yang laju pertumbuhan ekonominya mencapai 4,13 persen pada tahun 1997. Kemudian PDRB terus mengalami peningkatan pada tahun 2005 menjadi 5,85 % pada tahun 2006 meningkat lagi menjadi 5,95% dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 6,04%.

Apabila sektor lapangan usaha dikelompokkan ke dalam katagori sektor primer (pertanian, pertambangan), sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, gas dan air) serta sektor tersier (bangunan, perdagangan, angkutan, komunikasi, keuangan dan jasa-jasa) terlihat adanya kontribusi yang menyolok antara satu sektor lapangan usaha dengan lapangan usaha yang lain. Pada gambar 3.1 di halaman 60 terlihat bahwa dari pengelompokkan ketiga sektor ekonomi, tampak

peranan sektor primer mengalami fluktuasi sedangkan sektor sekunder mengalami fluktuasi tetapi tidak sampai terjadi pertumbuhan negatif seperti pada kelompok primer sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2007. Pada sektor tersier selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk lebih lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.7. pada halaman 60. Hal tersebut mengindikasikan bahwa struktur perekonomian kabupaten Bogor mengalami pergeseran dari sektor primer menjadi sektor sekunder dan tersier.

Gambar 3.1. Grafik Peningkatan LPE

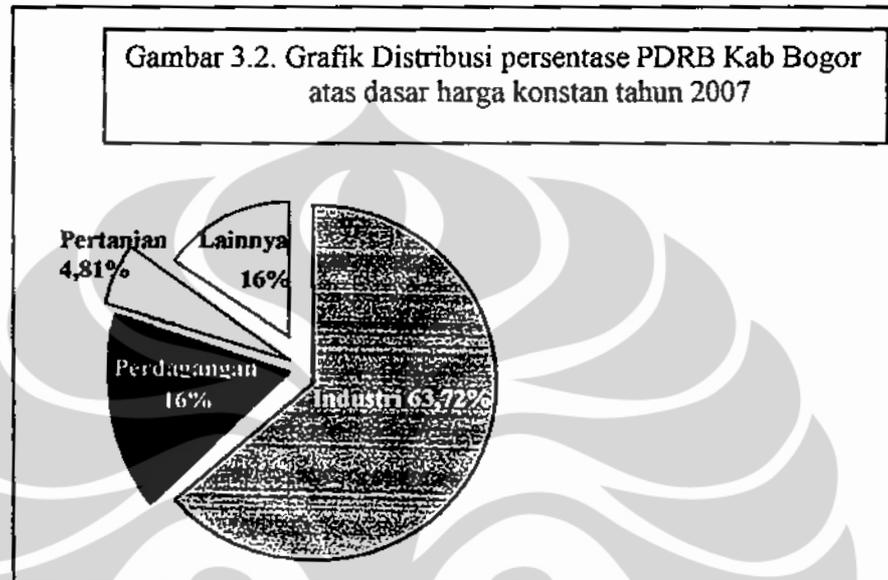


Tabel 3.7. Laju Pertumbuhan PDRB Riil kabupaten Bogor tahun 1998-2007 (%)

No.	Lapangan Usaha	Tahun									
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	Primer :	-	3,54	0,67	2,19	1,13	-2,94	-1,39	0,47	0,48	4,61
1.	Pertanian	-21,91	4,69	0,14	2,10	1,7	0,94	0,15	2,95	-1,21	4,63
2.	Pertambangan	-20,33	-5,14	4,31	2,74	2,71	4,53	-7,5	-10,11	8,73	4,56
	Sekunder:	-	1,26	2,01	3,57	4,68	5,35	5,99	5,94	5,98	5,53
3.	Industri	-13,93	1,38	0,73	2,17	4,40	4,22	5,96	5,91	5,93	5,34
4.	Listrik, Gas dan Air minum	9,15	4,37	17,52	19,28	7,86	7,79	5,92	7,23	7,82	8,02
5.	Bangunan	-46,65	-2,41	2,36	2,8	3,98	3,56	6,68	5,12	4,97	6,55
	Tersier:	-	1,55	3,38	4,35	5,45	6,06	6,6	7,21	7,38	7,93
6.	Perdagangan	-21,01	1,31	2,25	2,98	3,91	6,18	6,65	8,13	8,03	8,38
7.	Angkutan	-18,83	0,94	6,09	7,26	7,88	6,43	7,34	7,3	8,02	9,32
8.	Keuangan	-28,67	5,19	5,76	6,27	7,02	4,98	6,08	6,39	6,78	7,63
9	Jasa	-2,08	0,65	2,67	4,06	5,80	5,69	6,19	4,25	4,87	5,45
	PDRB	-17,71	1,61	2,20	3,61	4,46	4,81	5,58	5,85	5,95	6,04

Sumber : BPS

Dalam perkembangan terakhir perekonomian kabupaten Bogor didominasi oleh sektor industri sebesar 63,72 % diikuti oleh sektor perdagangan dan lainnya 16 % serta sektor pertanian 4,81 %. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.2. di bawah ini.



3.4. Fasilitas Penunjang Investasi

Fasilitas penunjang investasi adalah segala fasilitas yang menyangkut kelengkapan dasar suatu wilayah sifatnya membentang dalam suatu sistem jaringan meliputi : perasarana transportasi darat, jaringan irigasi, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air bersih. Fasilitas penunjang tersebut lebih dikenal dengan sebutan infrastruktur sosial dan ekonomi yang akan mempermudah dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan ekonomi (Lincoln Arsyad, 1999 : 214)

Panjang jalan kabupaten Bogor yaitu 1.790 km yang meliputi 72 km (tiga ruas) berupa jalan negara dan 144 km (8 ruas) berupa jalan provinsi serta 1.300 km (251 ruas) berupa jalan kabupaten. Kondisi jalan katagori baik yaitu 428 km,

katagori sedang yaitu 329 km, katagori rusak ringan yaitu 289 km dan katagori rusak berat yaitu 526 km. Jumlah jembatan adalah 496 unit, dengan status jembatan negara 29 unit, jembatan propinsi 134 unit, jembatan kabupaten 281 unit dan jembatan desa 52 unit. Jaringan listrik di kabupaten Bogor terdapat 645.189.610 kva sebagai daya terpasang, sedangkan kva terjual 1.758.463 kva.



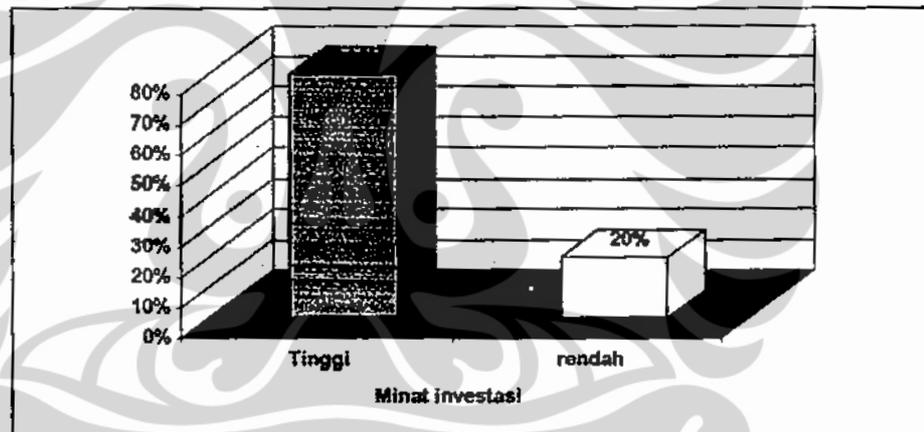
BAB IV

FAKTOR-FAKTOR PENENTU PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BOGOR

4.1. Minat Investasi

Responden yang diperoleh pada penelitian ini adalah 30 industri terdiri dari 15 industri PMA, 8 industri PMDN dan 7 industri non PMDN. Dengan menggunakan analisis univariat, dari 30 responden diperoleh proporsi minat investasi tinggi empat kali lebih banyak dibanding yang menjawab minat investasi rendah yaitu 80% (24 responden) dibanding 20% (6 responden), seperti yang digambarkan pada grafik di bawah ini.

Gambar 4.1. Proporsi minat investasi responden



4.2. Faktor Ekonomi dan non Ekonomi yang Mempengaruhi Investasi

Pada penelitian ini diteliti 6 variabel bebas yang diprediksi mempengaruhi investasi yaitu fasilitas penunjang, pelayanan pemerintah, kualitas informasi, sikap sosial masyarakat, lokasi dan beban pungutan. Distribusi frekuensi dari

kelompok atau pengkategorian keenam variabel bebas yang diteliti tersebut ditampilkan pada tabel 4.1.

Terlihat pada tabel tersebut, dari 30 responden diperoleh lebih banyak responden yang menjawab kondisi fasilitas penunjang baik (73,3%) dibanding responden yang menjawab kurang baik (26,7%). Analisis variabel pelayanan pemerintah menunjukkan proporsi responden yang menjawab baik lebih banyak bahkan mencapai empat kali dibanding yang menjawab kurang baik. Untuk variabel kualitas informasi diperoleh 73,3% menjawab baik sedangkan 26,7% menjawab kurang baik. Pada variabel Sikap Sosial masyarakat, semua responden (100%) menjawab kondusif, begitu juga terhadap variabel lokasi semua responden menjawab kabupaten Bogor merupakan lokasi strategis. Untuk variabel beban pungutan lebih banyak responden yang menganggap berat 86,7% sedangkan yang beranggapan ringan sebanyak 13,3%.

Tabel 4.1. Distribusi frekuensi dan proporsi variabel bebas yang diteliti

Variabel bebas	Kategori	Jumlah	persentase
Fasilitas penunjang	baik	22	73,3
	kurang	8	26,7
Pelayanan pemerintah	baik	24	80
	kurang	6	20
Kualitas Informasi	lengkap	22	73,3
	Tidak lengkap	8	26,7
Sikap Sosial masyarakat	kondusif	30	100
	Tidak kondusif	0	0
	apatis	0	0
Lokasi	Strategis	30	100
	Tidak strategis	0	0
Beban pungutan	berat	26	86,7
	ringan	4	13,3

4.3. Hubungan Faktor Ekonomi dan non Ekonomi yang Mempengaruhi Minat investasi

4.3.1. Hasil Kuisioner

Dari kuisioner diperoleh semua responden menjawab fasilitas penunjang, pelayanan pemerintah, kualitas informasi, sikap sosial masyarakat, lokasi, beban pungutan penting untuk mendukung adanya investasi. Hal ini konsisten dengan jawaban responden mengenai hubungan keenam variabel bebas tersebut terhadap investasi, yaitu hampir semua responden juga menjawab investasi tinggi dengan adanya dukungan fasilitas penunjang yang baik, pelayanan pemerintah daerah yang baik, kualitas informasi lengkap, lokasi sangat strategis dan sikap sosial masyarakat yang kondusif. Dengan demikian keenam faktor tersebut di atas diperlukan bagi investor untuk merealisasikan investasinya. Data secara rinci disajikan pada tabel 4.2 di halaman 66.

Tabel 4.2. Hubungan keenam variabel bebas terhadap investasi

Jenis Informasi	Kategori	Jumlah	%
Hubungan Fasilitas penunjang terhadap investasi	Tinggi jika fasilitas penunjang baik	28	93,3
	Tinggi walaupun fasilitas penunjang kurang baik	2	6,7
	Rendah walaupun fasilitas penunjang baik	0	0
	Rendah karena fasilitas penunjang kurang baik	0	0
Hubungan Pelayanan pemerintah terhadap investasi	Tinggi karena Pelayanan pemerintah daerah baik	28	93,3
	Tinggi walaupun Pelayanan pemerintah daerah kurang baik	2	6,7
	Rendah walaupun Pelayanan pemerintah daerah baik	0	0
	Rendah karena Pelayanan pemerintah daerah kurang baik	0	0
Hubungan Kualitas Informasi terhadap investasi	Tinggi karena informasi lengkap	27	90
	Tinggi walaupun informasi tidak lengkap	3	10
	Rendah walaupun informasi lengkap	0	0
	Rendah karena informasi tidak lengkap	0	0
Hubungan sikap sosial masyarakat terhadap investasi	Tinggi karena sikap sosial masyarakat kondusif	29	96,7
	Tinggi walaupun sikap sosial masyarakat tidak kondusif	0	0
	Rendah karena sikap sosial masyarakat kondusif	0	0
	Rendah walaupun sikap sosial masyarakat apatis	0	0
Hubungan Lokasi terhadap investasi	Rendah karena sikap sosial masyarakat tidak kondusif	1	3,3
	Rendah karena sikap sosial masyarakat apatis	28	93,3
	Tinggi karena lokasi sangat strategis	0	0
	Tinggi sekalipun lokasi tidak strategis	2	6,7
Hubungan beban pungutan terhadap investasi	Rendah karena lokasi sangat strategis	0	0
	Rendah walaupun lokasi sangat strategis	24	80
	Tinggi walaupun beban pungutan besar	5	16,7
	Tinggi karena beban pungutan kecil	1	3,3
	Rendah walaupun beban pungutan kecil	0	0

4.3.2. Analisis Bivariat

4.3.2.1. Faktor fasilitas penunjang terhadap Minat investasi

Sejumlah 90,9% responden menyatakan fasilitas penunjang baik sehingga minat investasinya tinggi. Dari analisis bivariat menggunakan *Chi square* diperoleh adanya hubungan yang bermakna antara faktor fasilitas penunjang terhadap minat investasi, dengan melihat nilai $P < 0,05$. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah.

Tabel 4.3. Faktor fasilitas penunjang terhadap minat investasi

Fasilitas penunjang	Minat investasi				Jumlah	Nilai P
	Tinggi		rendah			
	frekuensi	%	frekuensi	%		
Baik	20	90,9	2	9,1	22	0,029
kurang	4	50	4	50	8	
Jumlah	24	80	6	20	30	

Fasilitas penunjang berupa penyediaan sarana/prasarana transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara), telekomunikasi dan energi (listrik), merupakan tanggung jawab pemerintah. Berkaitan dengan investasi, faktor ini dapat ditinjau dari faktor non ekonomi karena walaupun secara ekonomi pembangunan sarana/prasarana umum tersebut tidak menguntungkan, tetapi tetap merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya bagi kepentingan umum.

Pembangunan sarana /prasarana transportasi, telekomunikasi dan energi memiliki arti politis yang menyangkut kewibawaan

pemerintah. Adanya transportasi dan komunikasi yang baik berdampak pula pada peningkatan pertahanan dan keamanan negara. Dalam hal ini pemerintah kabupaten Bogor berupaya meningkatkan fasilitas penunjang berupa rencana pembangunan jalan (Bogor outer ring road) yang akan direalisasikan dalam waktu dekat.

4.3.2.2. Faktor Pelayanan Pemerintah Terhadap Minat investasi

Sejumlah 91,7% responden menyatakan tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan pemerintah sehingga minat investasinya tinggi. Dari analisis bivariat menggunakan *Chi square* diperoleh adanya hubungan yang bermakna antara faktor pelayanan pemerintah terhadap minat investasi, dengan melihat nilai $P < 0,05$ seperti yang tersaji pada tabel 4.4. di halaman 69. Hal ini sejalan dengan kajian dan penelitian sebelumnya bahwa salah satu unsur penting dalam kegiatan investasi adalah kesiapan aparat sebagai penentu kebijakan investasi dalam bentuk perizinan. Jika aparat pemerintah di Kabupaten Bogor cukup mendukung kegiatan investasi dalam arti tidak mempersulit perizinan, maka minat investasi akan tinggi. Sebaliknya bila pelayanan pemerintah terkesan mempersulit memberikan perizinan, maka minat investasi akan rendah.

Peningkatan investasi tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi terutama masalah efisiensi. Perbaikan efisien dimulai dari penyederhanaan prosedur perizinan hingga penghapusan berbagai peraturan, khususnya

peraturan daerah yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Penerbitan Keppres nomor 29 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui sistem pelayanan satu atap, menerapkan pelayanan investasi satu atap dan kemudian diikuti dengan penerbitan keputusan kepala BKPM tentang pencabutan pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan penanaman modal kepada Gubernur Kep Daerah merupakan upaya untuk menyederhankan prosedur perijinan.

Tabel 4.4. Faktor pelayanan pemerintah terhadap minat investasi

pelayanan pemerintah	Minat investasi				jumlah	Nilai P
	Tinggi		rendah			
	frekuensi	%	frekuensi	%	frekuensi	
Baik	22	91,7	2	8,3	24	0,007
Kurang	2	3,3	4	66,7	6	
Jumlah	24	80	6	20	30	

4.3.2.3. Faktor Informasi Terhadap Minat investasi

Umumnya responden (90,9%) menyatakan tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh dan menghimpun informasi mengenai peluang investasi sehingga minat investasinya tinggi. Dari analisis bivariat menggunakan *Chi square* diperoleh adanya hubungan yang bermakna antara faktor informasi terhadap minat investasi, dengan melihat nilai $P < 0,05$. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.5 di halaman 70.

Informasi merupakan faktor yang berkaitan dengan minat investor untuk merealisasikan investasinya. Informasi yang paling diperlukan adalah data statistik yang terandal, sehingga dapat dilakukan perencanaan yang tepat (Todaro, 2003).

Tabel 4.5. Faktor kualitas informasi terhadap minat investasi

Informasi	Minat investasi				Jumlah	Nilai P
	Tinggi		Rendah			
	frekuensi	%	frekuensi	%		
Lengkap	20	90,9	2	9,1	22	0,029
Tidak lengkap	4	50	4	50	8	
Jumlah	24	80	6	20	30	

4.3.2.4. Faktor Lokasi Terhadap Minat investasi

Dari analisis bivariat menggunakan *Chi square* diperoleh tidak adanya hubungan yang bermakna antara faktor lokasi terhadap minat investasi. Hal ini karena semua responden (100%) menjawab lokasi kabupaten Bogor strategis untuk investasi. Data dapat dilihat pada tabel 4.6. di halaman 71.

Tabel 4.6. Faktor lokasi terhadap minat investasi

Lokasi	Minat investasi				Jumlah	Nilai P
	Tinggi		Rendah			
	frekuensi	%	frekuensi	%		
Strategis	24	80	6	20	30	-
Tidak Strategis	0	0	0	0	0	
jumlah	24	80	6	20	30	

Kabupaten Bogor letaknya strategis karena berada di antara kota-kota besar seperti Jakarta, Kabupaten Sukabumi, Tangerang, namun penentuan lokasi strategis tidak terlepas dari potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Jika suatu daerah memiliki sumber daya alam yang menguntungkan maka lokasi yang kurang strategis dapat diatasi dengan membangun fasilitas transportasi yang memadai.

4.3.2.5. Faktor Sikap Sosial Masyarakat Terhadap Minat investasi

Dari analisis bivariat menggunakan *Chi square* diperoleh tidak adanya hubungan yang bermakna antara faktor sikap sosial masyarakat terhadap minat investasi. Hal ini karena semua responden (100%) menjawab sikap sosial masyarakat kabupaten Bogor kondusif. Data dapat dilihat pada tabel 4.7 di halaman 72.

Tabel 4.7. Faktor sikap sosial masyarakat terhadap minat investasi

Sikap Sosial Masyarakat	Minat investasi				Jumlah	Nilai P
	Tinggi		Rendah			
	frekuensi	%	frekuensi	%		
Konduusif	24	79,3	6	20,7	30	-
Tidak Konduusif	0	0	0	0	0	
Jumlah	24	80	6	20	30	

Kondisi yang kondusif memperlihatkan bahwa masyarakat kabupaten Bogor umumnya memiliki respon yang positif terhadap kehadiran investor. Keikutan masyarakat dalam kegiatan investor terkait dengan peluang kerja yang ditawarkan proyek-proyek investasi. Hal ini dapat terlihat pada tahun 2007 di Kabupaten Bogor diselenggarakan Pameran bursa tenaga Kerja (Job Fair) 2007 yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bogor selama 2 hari 27-28 Nopember 2007 yang diikuti oleh 45 peserta investor PMA maupun PMDN. Pameran tersebut mendapat tanggapan positif dari masyarakat yang ingin mencari kerja, para investor asing dan domestik yang menanamkan investasinya diminati oleh masyarakat kabupaten Bogor, sedikitnya 11.000 ribu pencari kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan sangat antusias dengan adanya para investor tersebut.

4.3.2.6. Faktor Beban Pungutan Non-Ekonomi Terhadap Minat Investasi

Hasil penelitian menunjukkan meskipun sebanyak 76,9% responden yang menyatakan beban pungutan berat namun minat investasi tetap tinggi. Dari analisis bivariat menggunakan *Chi square* diperoleh tidak adanya hubungan yang bermakna antara faktor sikap sosial masyarakat terhadap minat investasi, dengan melihat nilai $P > 0,05$. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.8 di bawah ini.

Tabel 4.8 Faktor beban pungutan non ekonomi terhadap minat investasi

Beban Pungutan	Minat investasi				Jumlah	Nilai P
	Tinggi		Rendah			
	frekuensi	%	frekuensi	%		
Berat	20	76,9	6	23,1	26	0,388
Ringan	4	100	0	0	4	
Jumlah	24	80	6	20	30	

4.3.3. Analisis Multivariat

Langkah awal dalam mencari faktor yang paling dominan mempengaruhi minat investasi yaitu dilakukan pemilihan variabel berdasarkan hasil seleksi bivariat dari masing-masing variabel bebas dengan melihat nilai P. Jika $P < 0,25$ maka dipilih sebagai kandidat model analisa multivariat. Dari tabel 4.3 sampai dengan 4.8 terlihat bahwa variabel yang mempunyai nilai $P < 0,25$ adalah fasilitas penunjang, pelayanan pemerintah dan kualitas informasi.

Tahap kedua membuat pemodelan lengkap yaitu dilakukan analisis multivariat dengan memasukkan ketiga variabel bebas tersebut. Dari hasil analisis seperti pada tabel 4.9. terlihat variabel fasilitas penunjang dan kualitas informasi mempunyai nilai $P > 0,05$ yang terbesar.

Tabel 4.9. Analisis multivariat dari ketiga variabel bebas

Variabel	B	S.E.	Wald	Df	Sig	Exp(B)	95% CI
Pelayanan pemerintah	2.287	1.253	3.331	1	0.068	9.845	0.844-114.784
Fasilitas penunjang	1.162	1.278	.827	1	0.363	3.198	0,261-39,178
Kualitas informasi	1.162	1.278	.827	1	0.363	3.198	0,261- 39,178
Constant	-1.566	1.124	1.942	1	0.163	0.209	

Kemudian variabel tersebut dikeluarkan satu persatu. Pertama variabel Kualitas informasi dikeluarkan dan terlihat pada tabel 4.10. ternyata ada perubahan Exp(B) fasilitas penunjang lebih dari 10% maka variabel tersebut tidak jadi dikeluarkan.

Tabel 4.10. Analisis multivariat setelah variabel kualitas informasi dikeluarkan

Variabel	B	S.E.	Wald	Df	Sig	Exp(B)	95% CI
Pelayanan pemerintah	2.557	1.215	4.428	1	0.035	12.90	1.19-139,65
Fasilitas penunjang	1.538	1.194	1.658	1	0.198	4.65	0.45- 48,35
Constant	-1.279	1.050	1.482	1	0.223	0.278	

Selanjutnya variabel fasilitas penunjang dikeluarkan dan terlihat pada tabel 4.10 ternyata ada perubahan Exp(B) kualitas informasi lebih dari 10% maka variabel tersebut tidak jadi dikeluarkan. Dengan demikian model akhir dari regresi logistik yang diperoleh adalah seperti pada tabel 4.9. Namun faktor yang dominan mempengaruhi investasi adalah pelayanan pemerintah.

Dari analisis terhadap hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan, nampak jelas bahwa antara fasilitas penunjang, pelayanan pemerintah dan kualitas informasi dengan minat investasi mempunyai hubungan yang signifikan. Sedangkan lokasi, sikap sosial masyarakat dan beban pungutan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan minat investasi. Adapun faktor pelayanan pemerintah merupakan faktor yang paling dominan terhadap minat investasi, sehingga pelayanan pemerintah mempengaruhi para investor dalam berinvestasi di kabupaten Bogor.

Dampak investasi terhadap ketahanan daerah kabupaten Bogor dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi investasi yang ditanamkan di kabupaten Bogor baik langsung maupun tidak langsung akan menambah jumlah industri yang didirikan. Hal ini tentunya akan menambah lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja terutama bagi masyarakat kabupaten Bogor yang belum mendapat pekerjaan atau masih menganggur, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan mengurangi tingkat kerawanan sosial. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu aspek meningkatkan ketahanan daerah yang merupakan bagian integral dari ketahanan nasional.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian diketahui bahwa antara fasilitas penunjang, pelayanan pemerintah dan kualitas informasi dengan minat investasi mempunyai hubungan yang signifikan. Sedangkan lokasi, sikap sosial masyarakat dan beban pungutan non ekonomi tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan minat investasi. Hal ini dapat terlihat dari uji statistik menggunakan *chi square* menunjukkan bahwa 3 dari 6 variabel bebas tersebut secara statistik tidak ditemukan hubungan yang bermakna yaitu faktor lokasi, beban pungutan dan sikap sosial masyarakat.
2. Faktor yang paling dominan mempengaruhi investasi di kabupaten Bogor adalah pelayanan pemerintah. Hal ini terlihat dari analisis multivariat menggunakan regresi logistik diperoleh bahwa faktor yang mempengaruhi secara dominan terhadap investasi adalah pelayanan pemerintah.
3. Semakin tinggi investasi yang ditanamkan di kabupaten Bogor baik langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga ketahanan ekonomi kabupaten Bogor yang merupakan bagian dari ketahanan daerah kabupaten Bogor akan meningkat juga.

5.2. Saran

1. Untuk meningkatkan minat investor merealisasikan investasinya, maka pemerintah kabupaten Bogor seyogyanya meningkatkan fasilitas penunjang, meningkatkan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan murah, menyebarkan informasi yang jelas dan akurat mengenai peluang investasi melalui promosi.
2. Untuk meningkatkan ketahanan wilayah, pemerintah daerah hendaknya memprioritaskan investasi yang bersifat padat karya dan mengutamakan tenaga kerja setempat untuk bekerja sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Selain itu penggunaan tenaga kerja setempat dapat mengurangi tingkat pengangguran sehingga pada akhirnya akan mengurangi kerawanan sosial.
3. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan responden yang lebih banyak sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, "*Hukum Penanaman Modal di Indonesia*", Jakarta, Prenada Media, 2004
- Anton Agus Setyawan dan Fatchurrohman, "*Investasi, Ekspor dan Masalah Deindustrialisasi di Indonesia*", makalah Seminar Nasional Akademik Tahunan Ekonomi I Jakarta 8-9 Desember 2004.
- Arsyad, Lincolin, "*Ekonomika Pembangunan*", Edisi Ketiga, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 1999
- Bachrawi Sanusi, "*Pengantar Ekonomi Pembangunan*", Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004
- Bank Dunia, "*Investasi untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Pemulihan*", Jakarta : Bank Dunia, 2006
- BPS, "*Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Bogor*", BPS Kabupaten Bogor
- Bona.S., Frans, "*Peluang Bisnis dan Investasi di Berbagai Daerah Otonomi*" : Jakarta : Restu Agung, 2006,
- Ermaya Suradinata; Alex Dinuth, "*Geopolitik dan Konsepsi Ketahanan Nasional: Pemikiran Awal, Pengembangan dan Prospek*", Jakarta Paradigma Cipta Yastigama 2001,
- Jhingan ML, "*Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004
- Habib A Hasnan, "*Kapita Selekta : Strategi dan Hubungan Internasional*", Jakarta, Centre for Strategic and International Studies, 1997
- Krugman, Paul R, Obsield Maurice , "*Ekonomi Internasional*", Jakarta UI, 1997

"Kajian Ekonomi Regional Sulawesi Selatan", Triwulan II 2007

Lepi T. Tarmidi, *"Kajian Keterkaitan antara Ekonomi dan Ketahanan Nasional"*, Publikasi FEUI (0015) Nov.1995

Lembaga Ketahanan Nasional, 1993

M Fadhil Hasan , Deniey A Purwanto, *"Kebijakan Investasi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Adil dan Berkelanjutan"*, Jurnal kebijakan ekonomi, 1(3) April 2006

Mankiw N.Gregory, *"Teori Makro Ekonomi"*, Jakarta, Erlangga, 2003.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang *"Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing"*

Prathama Rahardja, Manurung Mandala, *"Pengantar Ilmu Ekonomi : Mikroekonomi & Makroekonomi"*, Jakarta FE UI, 2001

RM Sunardi, *"Pembinaan Ketahanan Bangsa"*, Jakarta, Kuarternita Adidarma, 2004

Riduwan, *"Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian"*, Bandung, Alfa Beta, 2005,

Sugiyono, *"Metode Peneltian Administrasi"*, Bandung, CV Alfabeta, 2003

Sadono Sukirno, *"Makroekonomi Modern :Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru "*, Jakarta PT Raja Grafindo, 2000

Sarwedi, *"Investasi langsung di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya"*, Jurnal Akutansi dan Keuangan, vol 4 no.1 2002

Sutanto, *"Statistik"*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006

Tarigan Robinson, *"Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi"*, Jakarta, Bumi Aksara, 2005

Todaro, Steven C Smith, "*Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*", Jakarta, Erlangga, 2003

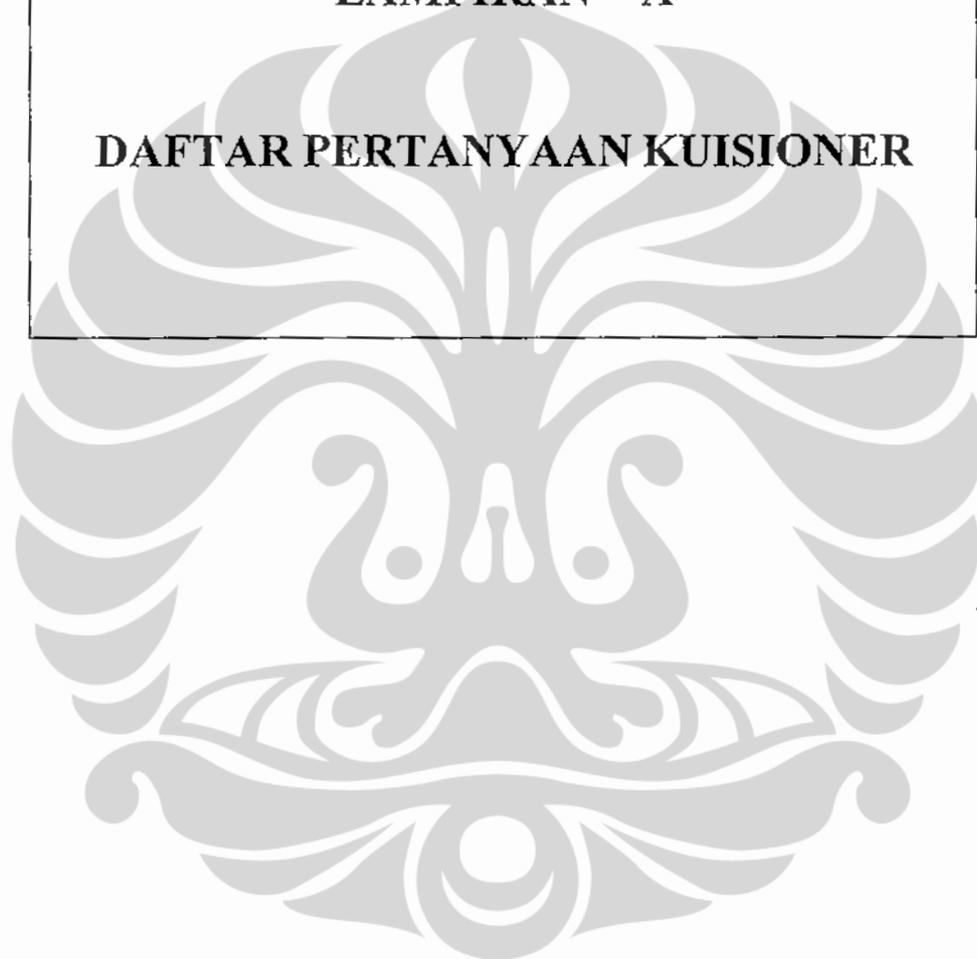
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang "*Penanaman Modal*"

Wan Usman, "*Daya Tahan Bangsa*", Jakarta, PKN UI, 2003



LAMPIRAN A

DAFTAR PERTANYAAN KUISIONER



2. Menurut saudara, pentingkah fasilitas penunjang (sarana/prasarana transportasi darat, laut, udara, komunikasi (telepon, faximile serta perangkat informatika lainnya), dan energi (listrik) bagi investasi di kabupaten Bogor ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

3. Menurut saudara, bagaimana kondisi fasilitas penunjang investasi di kabupaten Bogor ?
 - a. Baik dalam arti sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan produksi, berupa sarana/prasarana transportasi (darat, laut, udara) ; komunikasi (telepon, tele serta perangkat informatika lainnya), dan energi (listrik) tersedia dengan cukup.
 - b. Kurang dalam arti sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan produksi, berupa sarana/prasarana transportasi (darat, laut, udara) ; komunikasi (telepon, tele serta perangkat informatika lainnya), dan energi (listrik) tidak tersedia dengan cukup.

4. Menurut saudara bagaimana hubungan antara fasilitas penunjang yang tersedia dengan minat investasi?
 - a. Tinggi jika fasilitas penunjang baik
 - b. Tinggi walaupun fasilitas penunjang kurang baik
 - c. Rendah walaupun fasilitas penunjang baik
 - d. Rendah karena fasilitas penunjang kurang baik

5. Menurut saudara, pentingkah pelayanan pemerintah daerah bagi investasi di kabupaten Bogor ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

6. Menurut saudara bagaimana tingkat pelayanan pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan investasi ?
 - a. Baik dalam arti ada kemudahan-kemudahan dalam proses perencanaan sampai kegiatan berproduksi khususnya menyangkut administrasi perizinan.
 - b. Kurang dalam arti proses perencanaan sampai kegiatan berproduksi khususnya menyangkut administrasi perizinan cukup sulit dan berbelit-belit.

7. Menurut saudara bagaimana hubungan antara pelayanan pemerintah daerah dengan minat berinvestasi ?

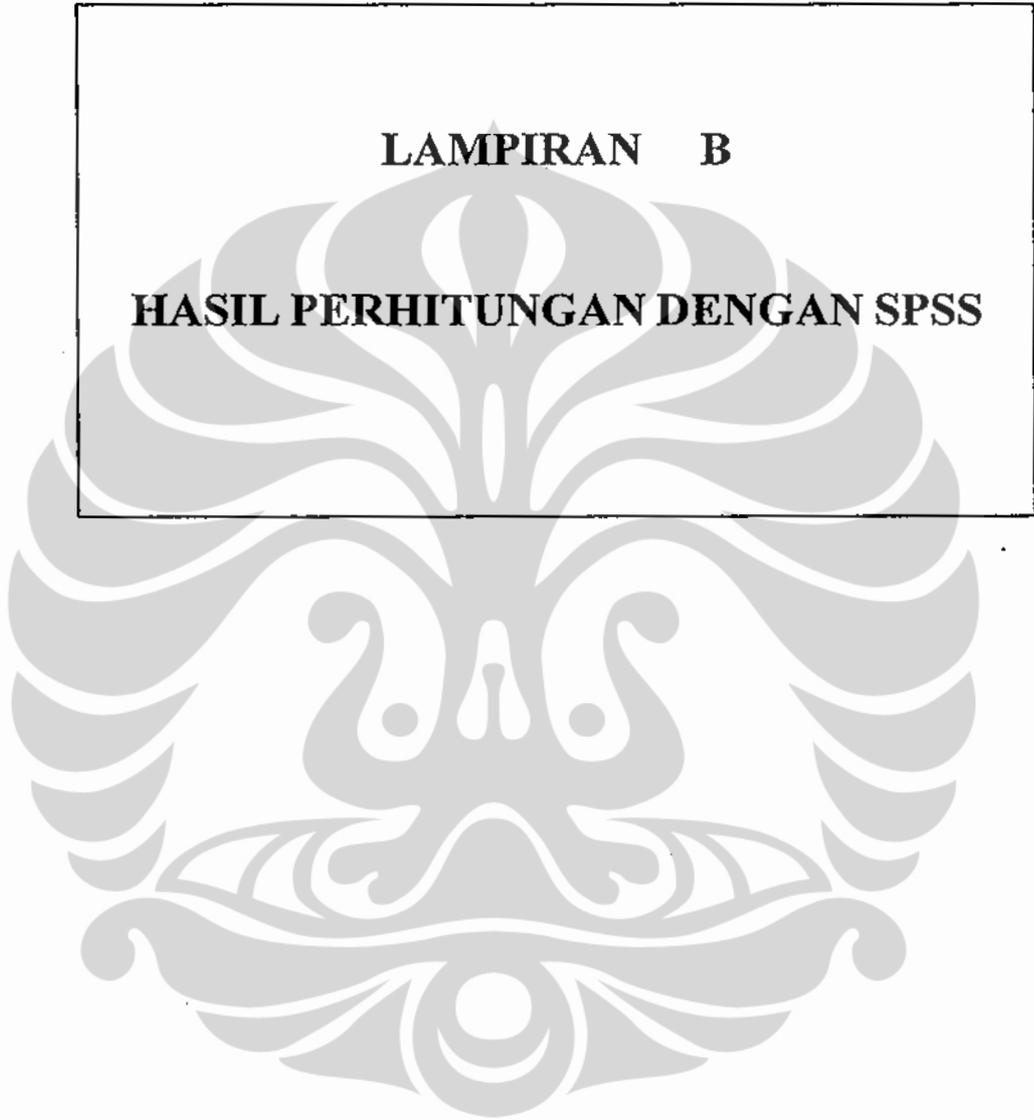
- a. *Tinggi karena pelayanan pemerintah daerah baik*
 - b. *Tinggi walaupun pelayanan pemerintah daerah kurang baik*
 - c. *Rendah walaupun pelayanan pemerintah daerah baik*
 - d. *Rendah karena pelayanan pemerintah daerah kurang baik*
8. Menurut saudara, pentingkah informasi yang akurat mengenai potensi dan peluang investasi bagi investasi di kabupaten Bogor ?
- a. *Ya*
 - b. *Tidak*
9. Menurut saudara bagaimana kualitas informasi mengenai investasi di kabupaten Bogor ?
- a. *Lengkap dalam arti ada gambaran yang jelas mengenai peluang investasi melalui informasi aktual yang dilkeuarkan oleh pemerintah daerah dan dimutakhirkan paling tidak satu kali dalam satu tahun.*
 - b. *Tidak lengkap dalam arti tidak ada gambaran yang jelas mengenai peluang investasi melalui informasi aktual yang dilkeuarkan oleh pemerintah daerah dan dimutakhirkan paling tidak satu kall dalam satu tahun. Data yang sudah ada tidak aktual lagi*
10. Menurut Saudara bagaimana hubungan antara ketersediaan informasi dengan minat berinvestasi ?
- a. *Tinggi karena informasi lengkap*
 - b. *Tinggi walaupun informasi tidak lengkap*
 - c. *Rendah walaupun informasi lengkap*
 - d. *Rendah karena informasi tidak lengkap*
11. Menurut saudara, pentingkah sikap sosial masyarakat bagi investasi di kabupaten Bogor ?
- a. *Ya*
 - b. *Tidak*
12. Kegiatan investasi secara langsung atau tidak langsung akan membawa perubahan dalam masyarakat. Menurut Saudara, bagaimana sikap sosial masyarakat Bogor dalam menyikapi kedatangan investasi ?

- a. *Konduusif, artinya masyarakat sekitar lokasi investasi tidak terganggu oleh kehadiran penanaman modal/perusahaan tersebut. Masyarakat bahkan ikut terlibat kegiatan produksi (menjadi karyawan), tidak melakukan tindakan kriminal yang mengganggu kegiatan produksi atau perusakan dan pencurian pada perusahaan*
- b. *Tidak kondusif, artinya masyarakat sekitar lokasi investasi merasa terganggu oleh kehadiran perusahaan tersebut, sehingga melakukan tindakan yang mengganggu kegiatan produksi atau perusakan dan pencurian pada perusahaan*
- c. *Tidak jelas (apatis) karena masyarakat bersikap tidak peduli terhadap kehadiran penanaman modal/perusahaan tersebut.*
13. Menurut Saudara, bagaimana hubungan antara sikap sosial masyarakat dengan kegiatan investasi ?
- a. *Tinggi karena sikap sosial masyarakat kondusif*
- b. *Tinggi walaupun sikap sosial masyarakat tidak kondusif*
- c. *Tinggi walaupun sikap sosial masyarakat apatis (tidak peduli)*
- d. *Rendah walaupun sikap sosial masyarakat kondusif*
- e. *Rendah karena sikap sosial masyarakat tidak kondusif*
- f. *Rendah karena sikap sosial masyarakat apatis (tidak peduli)*
14. Menurut saudara, pentingkah lokasi investasi yang strategis (*memiliki akses untuk mendapatkan bahan baku dan memasarkan hasil produksinya*) bagi investasi di kabupaten Bogor ?
- a. *Ya*
- b. *Tidak*
15. Menurut saudara bagaimana kondisi lokasi investasi di kabupaten Bogor ?
- a. *Strategis (memiliki akses untuk mendapatkan bahan baku dan memasarkan hasil produksinya)*
- b. *Tidak strategis (lokasi tempat investasi sulit dicapai atau walaupun ada, sarana transportasinya terbatas, harga tanah relatif mahal).*
16. Menurut saudara bagaimana hubungan antara lokasi dengan kegiatan berinvestasi ?
- a. *Tinggi karena lokasi sangat strategis*
- b. *Tinggi sekalipun lokasi tidak strategis*
- c. *Rendah walaupun lokasi strategis*
- d. *Rendah karena lokasi tidak strategis*

17. Beban pungutan non-ekonomis adalah biaya yang dibebankan kepada investor. Biaya ini bisa dalam bentuk sumbangan kepada masyarakat, aparat dll. Menurut Saudara, bagaimana kondisi beban pungutan ini ?
- Berat karena sumbangan tersebut sebenarnya tidak terkait langsung dengan kegiatan produksi sehingga investor terpaksa kehilangan sebagian besar keuntungannya untuk biaya-biaya tersebut*
 - Ringan karena sumbangan yang diminta cukup kecil dibanding keuntungan*
18. Menurut Saudara, bagaimana hubungan antara beban pungutan tersebut dengan minat berinvestasi ?
- Tetap tinggi walaupun beban pungutan besar*
 - Tinggi karena beban pungutan kecil*
 - Rendah karena beban pungutan besar*
 - Rendah walaupun beban pungutan kecil*

LAMPIRAN B

HASIL PERHITUNGAN DENGAN SPSS



Frequencies

inves

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid rendah	6	20.0	20.0	20.0
tinggi	24	80.0	80.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

pentingfas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	30	100.0	100.0	100.0

konfas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang	8	26.7	26.7	26.7
baik	22	73.3	73.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

hubfas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tinggiA	28	93.3	93.3	93.3
tinggiB	2	6.7	6.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

pentingyan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	30	100.0	100.0	100.0

Konyanpem

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang	6	20.0	20.0	20.0
baik	24	80.0	80.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

hubyanpem

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tinggiA	28	93.3	93.3	93.3
tinggiB	2	6.7	6.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Pentinginfo

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	30	100.0	100.0	100.0

kualinfo

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak	8	26.7	26.7	26.7
lengkap	22	73.3	73.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Hubinfo

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tinggiA	27	90.0	90.0	90.0
tinggiB	3	10.0	10.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

PentingSkp

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	30	100.0	100.0	100.0

konskp

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kondusif	30	100.0	100.0	100.0

HubSkp

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid rendahC	1	3.3	3.3	3.3
tinggiA	29	96.7	96.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Pentinglokasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	30	100.0	100.0	100.0

konlokasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid strategis	30	100.0	100.0	100.0

hublokasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid rendah	2	6.7	6.7	6.7
tinggiA	28	93.3	93.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

konpungutan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid berat	26	86.7	86.7	86.7
ringan	4	13.3	13.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

hubpungutan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid rendah	1	3.3	3.3	3.3
tinggiA	24	80.0	80.0	83.3
tinggiB	5	16.7	16.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

hubpung1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid rendah	1	3.3	3.3	3.3
tinggi	29	96.7	96.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Crosstabs

konfas * inves Crosstabulation

		inves		Total	
		rendah	tinggi		
konfas	kurang	Count	4	4	8
		% within konfas	50.0%	50.0%	100.0%
	baik	Count	2	20	22
		% within konfas	9.1%	90.9%	100.0%
Total		Count	6	24	30
		% within konfas	20.0%	80.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.136 ^b	1	.013		
Continuity Correction ^a	3.846	1	.050		
Likelihood Ratio	5.530	1	.019		
Fisher's Exact Test				.029	.029
Linear-by-Linear Association	5.932	1	.015		
N of Valid Cases	30				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.60.

Crosstabs

hubfas * inves Crosstabulation

			inves		Total
			rendah	tinggi	
hubfas	tinggiA	Count	5	23	28
		% within hubfas	17.9%	82.1%	100.0%
	tinggiB	Count	1	1	2
		% within hubfas	50.0%	50.0%	100.0%
Total		Count	6	24	30
		% within hubfas	20.0%	80.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.205 ^b	1	.272		
Continuity Correction ^a	.033	1	.855		
Likelihood Ratio	.975	1	.323		
Fisher's Exact Test				.366	.366
Linear-by-Linear Association	1.165	1	.280		
N of Valid Cases	30				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.

Crosstabs

Konyanpem * inves Crosstabulation

			inves		Total
			rendah	tinggi	
Konyanpem	kurang	Count	4	2	6
		% within Konyanpem	66.7%	33.3%	100.0%
	baik	Count	2	22	24
		% within Konyanpem	8.3%	91.7%	100.0%
Total		Count	6	24	30
		% within Konyanpem	20.0%	80.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10.208 ^b	1	.001		
Continuity Correction ^a	6.888	1	.009		
Likelihood Ratio	8.618	1	.003		
Fisher's Exact Test				.007	.007
Linear-by-Linear Association	9.868	1	.002		
N of Valid Cases	30				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 3 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.20.

Crosstabs

hubyanpem * inves Crosstabulation

			inves		Total
			rendah	tinggi	
hubyanpem	tinggiA	Count	6	22	28
		% within hubyanpem	21.4%	78.6%	100.0%
	tinggiB	Count	0	2	2
		% within hubyanpem	.0%	100.0%	100.0%
Total		Count	6	24	30
		% within hubyanpem	20.0%	80.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.536 ^b	1	.464		
Continuity Correction ^a	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.928	1	.335		
Fisher's Exact Test				1.000	.634
Linear-by-Linear Association	.518	1	.472		
N of Valid Cases	30				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.

Crosstabs

kualinfo * inves Crosstabulation

			inves		Total
			rendah	tinggi	
kualinfo	tidak	Count	4	4	8
		% within kualinfo	50.0%	50.0%	100.0%
	lengkap	Count	2	20	22
		% within kualinfo	9.1%	90.9%	100.0%
Total		Count	6	24	30
		% within kualinfo	20.0%	80.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.136 ^b	1	.013		
Continuity Correction ^a	3.846	1	.050		
Likelihood Ratio	5.530	1	.019		
Fisher's Exact Test				.029	.029
Linear-by-Linear Association	5.937	1	.015		
N of Valid Cases	30				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.60.

Crosstabs

Hubinfo * inves Crosstabulation

			inves		Total
			rendah	tinggi	
Hubinfo	tinggiA	Count	0	21	21
		% within Hubinfo	22.2%	77.8%	100.0%
	tinggiB	Count	0	3	3
		% within Hubinfo	0.0%	100.0%	100.0%
Total		Count	6	24	30
		% within Hubinfo	20.0%	80.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.833 ^b	1	.361		
Continuity Correction ^a	.023	1	.879		
Likelihood Ratio	1.420	1	.233		
Fisher's Exact Test				1.000	.499
Linear-by-Linear Association	.806	1	.369		
N of Valid Cases	30				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .60.

Crosstabs

HubSkp * inves Crosstabulation

		inves		Total
		rendah	tinggi	
HubSkp rendahC	Count	0	1	1
	% within HubSkp	.0%	100.0%	100.0%
tinggiA	Count	6	23	29
	% within HubSkp	20.7%	79.3%	100.0%
Total	Count	6	24	30
	% within HubSkp	20.0%	80.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.259 ^b	1	.611		
Continuity Correction ^a	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.455	1	.500		
Fisher's Exact Test				1.000	.800
Linear-by-Linear Association	.250	1	.617		
N of Valid Cases	30				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .20.

Crosstabs

hublokasi * inves Crosstabulation

			inves		Total
			rendah	tinggi	
hublokasi	rendah	Count	0	2	2
		% within hublokasi	.0%	100.0%	100.0%
	tinggiA	Count	6	22	28
		% within hublokasi	21.4%	78.6%	100.0%
Total		Count	6	24	30
		% within hublokasi	20.0%	80.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.536 ^b	1	.464		
Continuity Correction ^a	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.928	1	.335		
Fisher's Exact Test				1.000	.634
Linear-by-Linear Association	.518	1	.472		
N of Valid Cases	30				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 2 cells (.667%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.

Crosstabs

kompungutan * inves Crosstabulation

			inves		Total
			rendah	tinggi	
kompungutan	berat	Count	6	20	26
		% within kompungutan	23.1%	76.9%	100.0%
	ringan	Count	0	4	4
		% within kompungutan	.0%	100.0%	100.0%
Total		Count	6	24	30
		% within kompungutan	20.0%	80.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.154 ^b	1	.283		
Continuity Correction ^a	.162	1	.687		
Likelihood Ratio	1.934	1	.164		
Fisher's Exact Test				.557	.388
Linear-by-Linear Association	1.115	1	.291		
N of Valid Cases	30				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .80.

Crosstabs

hubung1 * inves Crosstabulation

			inves		Total
			rendah	tinggi	
hubung1	rendah	Count	0	1	1
		% within hubung1	.0%	100.0%	100.0%
	tinggi	Count	6	23	29
		% within hubung1	20.7%	79.3%	100.0%
Total		Count	6	24	30
		% within hubung1	20.0%	80.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.259 ^b	1	.611		
Continuity Correction ^a	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.455	1	.500		
Fisher's Exact Test				1.000	.800
Linear-by-Linear Association	.250	1	.617		
N of Valid Cases	30				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .20.